

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA  
TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah**



**Oleh :**

**NIKEN SETYO NINGRUM**  
**NIM. 19.52.21.089**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA  
2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI INDONESIA TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

**Oleh:**

**NIKEN SETYO NINGRUM**  
**NIM. 19.52.21.089**

Surakarta, 6 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.**  
**NIP. 19841008 201403 2 005**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIKEN SETYO NINGRUM  
NIM : 19.52.21.089  
Program Studi : AKUNTANSI SYARIAH  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2020”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti/dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 11 April 2023



Niken Setyo Ningrum

## **SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIKEN SETYO NINGRUM

NIM : 19.52.21.089

Program Studi : AKUNTANSI SYARIAH

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian saya yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2020”**.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari website resmi setiap pemerintah daerah di Indonesia pada tahun anggaran 2020. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 11 April 2023



Niken Setyo Ningrum

Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Niken Setyo Ningrum

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Niken Setyo Ningrum NIM: 19.52.21.089 yang berjudul:

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2020”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 11 April 2023  
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.  
NIP. 19841008201403 2 005

**PENGESAHAN**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**  
**TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**  
**TAHUN 2020**

Oleh:

**NIKEN SETYO NINGRUM**  
**NIM. 19.52.21.089**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 / 14 Syawal 1444 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Samsul Rosadi, M.Si.  
NIK. 19871221 201701 1 165



---

Penguji II  
Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si.  
NIP. 19860625 201403 2 001



---

Penguji III  
Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP.  
NIP. 19860625 201403 2 001



---

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si  
NIP. 19720304 200112 1 004

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

(QS. Ali Imran: 139)

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.”

(QS. Al Baqarah: 45)

“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

(QS. At Talaq: 4)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar Rad: 11)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya sederhana ini dengan segenap cinta, doa dan keikhlasanku untuk:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Agung. Dengan takdir yang diberikan-Nya kepada saya, sehingga bisa menjadi pribadi yang bahagia, ceria, berpikir, berilmu, dan beriman. Semoga langkah kecil ini bisa menjadi pijakan untuk langkah besar ke depan dalam mewujudkan impian saya.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Setyo Mulyono dan Ibu Supatmi yang selalu mendoakan dan mendukung saya tanpa henti.
3. Kedua adik saya, Deilla Patricia dan Yusuf Al Ghofar, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan ridhonya dalam segala aktivitas saya.
4. Ibu Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen pengampu yang telah menyumbangkan ilmu dan pengalamannya.
6. Sahabat-sahabat SMK dan kuliah saya karena mereka adalah tempat saya dapat bertukar pikiran dan memperdalam studi saya.
7. Teman-teman Akuntansi Syariah kelas C dan kelas D angkatan 2019 yang menjadi teman seperjuangan semasa kuliah.
8. Dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta yang tercinta.



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2020” sebagai tugas akhir guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Bidang Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi waktu, pikiran, dan tenaga. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak H. Khairul Imam, S.H.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Sayekti Endah Retno Meilani, SE., M.Si., AK., CA., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Ibu Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak, Ibu, dan kedua adik saya tersayang yang telah memberikan banyak doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
8. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa restu selama perkuliahan.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya Akuntansi Syariah kelas C dan D angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis.

Akhir kata, teruntuk semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada kita semua. *Aamiin*

*Wassalamua'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, Maret 2023

**Penulis**

## **ABSTRACT**

Transparency of local government financial reporting includes the availability of adequate and easy-to-understand financial information, presented by each local government for use by users. There are several problems, mainly related to the size of local governments, the quality of financial reports, and the ratio of debt financing to the transparency of local government financial reporting in Indonesia. So the purpose of this research is to examine the impact of local government size, quality of financial reporting, and debt financing ratios on transparency in local government financial reporting.

This research method is a quantitative method. The population of this study is all local governments in Indonesia, totaling 542 local governments at both the provincial and district/city levels. A total of 516 local governments were selected as samples, using a purposive sampling technique. The data used is secondary data taken from the official local government website. The analysis tool uses the Eviews 10 program. The data analysis used is Multiple Linear Regression Analysis.

Research proves that the size of local government has a positive effect on the transparency of local government financial reporting. On the other hand, debt financing ratios and the quality of financial reports have no effect on the transparency of local government financial reporting. This finding indicates that there are several local governments that are not fully transparent regarding their financial reporting to the public.

**Keywords:** Size of Local Government, Quality of Financial Reports, Debt Financing Ratio, Transparency of Local Government Financial Reporting.

## ABSTRAK

Transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah mencakup ketersediaan informasi keuangan yang memadai dan mudah dipahami, disajikan oleh setiap pemerintah daerah untuk dimanfaatkan oleh pengguna. Terdapat beberapa masalah, terutama berkaitan dengan ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan rasio pembiayaan utang terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sehingga tujuan dari penelitian untuk mengkaji dampak ukuran pemerintah daerah, kualitas pelaporan keuangan, dan rasio pembiayaan utang terhadap transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Metode penelitian ini ialah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu seluruh pemerintah daerah di Indonesia, yang berjumlah 542 pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebanyak 516 pemerintah daerah dipilih sebagai sampel, dengan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diambil dari situs resmi pemerintah daerah. Alat analisis menggunakan program Eviews 10. Analisis data yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda.

Penelitian membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, rasio pembiayaan utang dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum sepenuhnya transparan perihal pelaporan keuangannya kepada publik.

Kata Kunci: Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Rasio Pembiayaan Utang, Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	I
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	II
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	III
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	IV
NOTA DINAS .....	V
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	VI
MOTTO.....	VI
PERSEMBAHAN .....	VII
KATA PENGANTAR .....	IX
ABSTRACT.....	XI
ABSTRAK .....	XII
DAFTAR ISI .....	XIII
DAFTAR TABEL .....	XVII
DAFTAR GAMBAR.....	XVIII
DAFTAR LAMPIRAN .....	XIX
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Batasan Masalah .....	12
1.4 Rumusan Masalah .....	12
1.5 Tujuan Penelitian .....	12
1.6 Manfaat penelitian .....	13

1.7 Jadwal Penelitian .....	14
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
2.1 Kajian Teori .....	16
2.1.1 Teori Signalling .....	16
2.1.2 Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah .....	19
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan .....	20
2.1.5 Rasio Pembiayaan Utang .....	22
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan .....	23
2.3 Kerangka Berfikir .....	31
2.4 Hipotesis .....	32
2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	32
2.4.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	33
2.4.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian .....	36
3.2 Jenis Penelitian .....	36
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	37
3.3.1 Populasi .....	37

3.3.2 Sampel .....	37
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel .....	38
3.4 Data dan Sumber Data .....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6 Variabel Penelitian .....	39
3.6.1 Variabel Terikat (Dependen Variabel) .....	39
3.6.2 Variabel bebas (Independen Variabel) .....	39
3.7 Definisi Operasional Variabel .....	39
3.8 Teknik Analisis Data .....	42
3.8.1 Uji Asumsi Klasik .....	42
3.8.2 Uji Ketepatan Model .....	45
3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....	46
3.8.4 Uji Hipotesis (Uji Statistik t) .....	47
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	49
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data .....	50
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	50
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	54
4.2.3 Uji Ketepatan Model .....	57
4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	59
4.2.5 Uji Hipotesis (Uji t) .....	61
4.3 Pembahasan Hasil Analisis .....	64

4.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	64
4.3.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	67
4.3.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	70
BAB V PENUTUP .....	73
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	74
5.3 Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN .....	80



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 : Keteraksesan Website Pemerintah Daerah .....	4
Tabel 2. 1 : Hasil Penelitian yang Relevan .....	23
Tabel 3. 1 : Pemilihan Sampel Penelitian.....	37
Tabel 3. 2 : Definisi Operasional Variabel .....	40
Tabel 3. 3 : Pengukuran Pengungkapan Transparansi .....	41
Tabel 4. 1 : Ringkasan Pemilihan Sampel Penelitian .....	49
Tabel 4. 2 : Hasil Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4. 3 : Hasil Uji Multikolinearitas .....	55
Tabel 4. 4 : Hasil Uji Autokorelasi .....	56
Tabel 4. 5 : Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	57
Tabel 4. 6 : Hasil Uji F.....	58
Tabel 4. 7 : Hasil Uji $R^2$ .....	59
Tabel 4. 8 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	60
Tabel 4. 9 : Hasil Uji t.....	62
Tabel 4. 10 : Hasil Uji Hipotesis .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 : Kerangka Berfikir .....	31
Gambar 4. 1 : Hasil Uji Normalitas .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian .....	81
Lampiran 2 : Kriteria Sampel Penelitian.....	82
Lampiran 3 : Daftar Pengungkapan Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah Tahun 2020 .....	83
Lampiran 4 : Daftar Pemerintah Daerah dan Hasil Pengumpulan Data .....	131
Lampiran 5 : Hasil Output Eviews 10.....	153
Lampiran 6 : Hasil Uji Plagiasi.....	157
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup .....	158

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Transparansi menggambarkan tantangan bagi reformasi di bidang publik masa kini dan masa depan menuju pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dan modern. Transparansi merupakan nilai demokrasi yang penting, pemerintahan yang kredibel, efisien, dan akuntabel. Apalagi dibawah bentuk pemerintahan di Indonesia yaitu demokrasi, transparansi informasi adalah suatu kewajiban (Adiputra, Utama, & Rossieta, 2018).

Ukuran pemerintah daerah biasanya menjadi fokus utama penelitian dalam menentukan sejauh mana informasi wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*) (Medina, 2012). Besar kecilnya pemerintah daerah menjadi alasan dapat berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin besarnya ukuran pemerintah daerah, maka semakin besar pula pelayanan sumber daya untuk diberikan kepada publik. Tentunya hal ini dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Rahmawati & Mahmud, 2016).

Kualitas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang mencukupi keinginan yang berkepentingan, menggunakan kriteria berikut relevan, mampu diandalkan, mampu dibandingkan, dapat dipahami, tepat waktu dan bermanfaat (Atril & McLaney, 1991) dalam (Nainggolan dan Purwanti, 2016).

Kualitas laporan keuangan merupakan alasan dapat berpengaruhnya transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang

mewakili neraca wajar entitas, hasil keuangan yang diperoleh serta arus kas adalah laporan keuangan mempunyai kualitas tinggi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai transparansi dalam mengelola keuangan daerah dengan informasi pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan karakteristik tersebut (Nosihana dan Yaya, 2016).

Rasio pembiayaan utang ialah keahlian pemerintah menjamin dana yang terkumpul untuk membagikan layanan serta program untuk warga. Hal ini menciptakan hubungan antara pemerintah dan kreditur, dimana rasio pembiayaan utang terus menjadi besar hendak menimbulkan pengawasan kreditur terhadap penggunaan dana yang dipinjam dan kemampuan untuk mengembalikannya di masa depan (Medina 2012).

Rasio pembiayaan utang merupakan alasan dapat berpengaruhnya transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah yang mulai meminjam beberapa dana dari pihak eksternal, mewajibkan pemerintah tersebut mempublikasikan keuangan daerahnya selaku wujud pertanggungjawaban terhadap kreditur serta membagikan data kepada kreditur menimpa sejauh mana tingkatan kesanggupan dalam pengembaliannya (Nosihana & Yaya, 2016).

Pemerintah wajib mengungkapkan informasi kepada publik pada kasus seperti pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Transparansi menyediakan informasi publik adalah bagian terpenting dari *good governance*. Semenjak ditetapkannya UU No. 14 tahun 2008 menyangkut Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah harus membangun kepercayaan dengan bersikap terbuka dan transparan. Transparansi

adalah kunci kesuksesan menghadapi dampak pandemi (Wilopo, 2017).

Sesuai dengan keterbukaan informasi publik, semua data publik harus tersedia dan dapat dijangkau dengan cepat, akurat, ekonomis, dan mudah oleh pengguna. Data yang mudah diakses oleh publik dan pihak lain sangat penting bagi pemerintah daerah yang transparan. Publikasi laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah merupakan salah satu cara pemerintah daerah dapat menunjukkan transparansi (Trisnawati dan Achmad, 2013).

Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat yakni menyampaikan laporan pertanggungjawaban, yaitu keuangan. Salah satu tugas pemerintah tersebut dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Wilopo, 2017).

Masalahannya adalah buruknya transparansi keuangan daerah yang berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberi bantuan dan ketenteraman pada masyarakatnya. Fenomena yang ditemui dalam penelitian ini, dapat digambarkan bahwa transparansi Indonesia masih lemah, sehingga tindakan korupsi masih saja terjadi (Rahmawati dan Mahmud, 2016).

Berdasar IHPS I Tahun 2021 memuat 541 (99%) hasil audit LKPD Tahun 2020 dari 542 pemerintah daerah yang wajib membuat laporan keuangan tahun 2020. Bahkan masih ada 1 pemerintah daerah yang belum menyerahkan laporan keuangan kepada BPK, yakni Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Tahun 2020, BPK menerbitkan 486 opini WTP (90%), 49 opini WDP (9%), 4 opini TMP (0,7%) dan 2 opini TW (0,3%) terhadap 541 LKPD (BPK RI, 2022).

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa dari 100% pemerintah daerah hanya 149 pemerintah daerah yang menunjukkan menu transparansi pengelolaan anggaran daerah yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Karawang, dan sebagainya. Pemerintah daerah yang menunjukkan LKPD tahun anggaran 2020 serta bisa diakses langsung hanya 168 pemerintah daerah saja salah satunya Kabupaten Dairi, sebaliknya sebanyak 135 pemerintah daerah wajib melewati web PPID (Pejabat Pengelola Data dan Dokumentasi), serta sisanya belum mengupload pada website. (Penjelasan Tabel 1.1)

Tabel 1. 1  
Keteraksesan Website Pemerintah Daerah

<b>KETERANGAN</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia	542	100%
Website Pemerintah Daerah tidak tersedia dan tidak dapat diakses	18	3,32%
Pemerintah Daerah yang terdapat menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	149	27,49%
Pemerintah Daerah yang mengupload LKPD Tahun Anggaran 2020 di website resmi Pemerintah Daerah	299	55,17%
Tersedia link PPID setiap pemerintah daerah	251	46,31%

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Fenomena yang menggambarkan dalam perubahan pada aspek publik Indonesia saat ini adalah meningkatnya desakan transparansi publik dari masyarakat, di pusat maupun di daerah. Transparansi publik pada dasarnya adalah memberikan informasi dan transparansi mengenai kegiatan pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemangku kepentingan, serta informasi terkait kepatuhan hak publik (Mardiasmo, 2002).

Beberapa penelitian sebelumnya yang menyelidiki transparansi laporan keuangan daerah antara lain temuan Yudistira & Rohman, (2022), menemukan jelas mempengaruhi transparansi pemerintah daerah. Bagaimanapun, kualitas laporan keuangan (OPINI) dan tingkat respon (ACCRUAL) berdampak negatif terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah.

Temuan Octavio (2022), transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan kematangan *e-government*. Menurut Hasibuan & Muid, (2021) membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah dan lingkungan politik di pemerintah daerah mempengaruhi secara positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah. Namun, baik tingkat respon dari pemerintah daerah maupun kualitas laporan keuangan dari daerah tidak memiliki dampak yang signifikan.

Hasil penelitian Chairani, Tertiaro, & Rela, (2021) menyimpulkan bahwa persaingan politik dan ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di situs resmi pemerintah daerah. Kasus lain dengan rasio kemandirian daerah dan jumlah penduduk berdampak positif atas pengungkapan laporan keuangan di website pemerintah daerah Indonesia.

Temuan Krah & Mertens (2020) menunjukkan bahwa demokrasi, hal ini terbukti meningkatkan transparansi keuangan pemerintah daerah. Ideologi politik berdampak pada transparansi secara signifikan. Ukuran pemerintah daerah mempunyai hubungan positif signifikan dengan transparansi keuangan pemerintah daerah.



Temuan Pranaswati & Kiswanto (2020), tingkat kekayaan pemerintah daerah, realisasi pemungutan pajak daerah, dan kompetisi politik memberikan pengaruh positif yang besar pada transparansi pelaporan keuangan pemerintah provinsi. Transparansi laporan keuangan pemerintah provinsi tidak dipengaruhi oleh rasio pembiayaan utang (leverage), kualitas laporan keuangan, kekuatan partai politik, dan masa jabatan kepala daerah.

Temuan Adhiputra, Utama, & Rossitea, (2018) membuktikan bahwa lingkungan politik dan kualitas opini audit yang digunakan dalam pelaporan keuangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah Indonesia. Selain itu, transparansi pemerintah daerah di Indonesia tidak terpengaruh oleh respons pemerintah daerah dan pemerintah terhadap peraturan pemerintah daerah di Indonesia.

Menurut hasil Wilopo, (2017), tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan satu-satunya yang menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan informasi pelaporan keuangan yang transparan melalui website pemerintah daerah. Faktor lainnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Hasil temuan Nosihana & Yaya, (2016), menyimpulkan kompetisi politik mempengaruhi publikasi laporan keuangan secara online. Publikasi laporan keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah. Tetapi, sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ, hasil tersebut tidak menunjukkan rasio pembiayaan utang, kekayaan pemerintah daerah, jenis pemerintah daerah, dan opini audit berpengaruh signifikan pada pelaporan keuangan di internet melalui *e-government*.

Hasil temuan Rahmawati & Mahmud, (2016) menandakan tingkat kemakmuran berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. Sedangkan ukuran pemda, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota DPR tidak berpengaruh.

Temuan Christina, (2016) menunjukkan variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Pembiayaan Hutang berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Belanja Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Waliyyani & Mahmud, (2015), tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dipengaruhi oleh karakteristik pemerintah. Variabel *size*, temuan audit, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, umur pemerintah daerah memiliki pengaruh positif pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemda.

Temuan Ratmono I. W., (2015) uji regresi logistik menunjukkan bahwa opini audit dan pendapatan per kapita berpengaruh pada akses pemerintah daerah terhadap Information Disclosure Index (IFR). Sementara itu, ketersediaan IFR pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, atau kemandirian finansial.

Penelitian Ratmono I. W., (2015) selanjutnya yang menunjukkan hasil pengujian regresi berganda bahwa kemandirian finansial pemerintah daerah berpengaruh pada keteraksesan IFR melalui website pemerintah daerah. Sementara itu, keteraksesan IFR melalui situs web pemerintah daerah tidak

terpengaruh oleh kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita, atau opini.

Hasil penelitian Rahman, Sutaryo, & Budiarmanto, (2013) menunjukkan variabel kompetisi politik (*political competition*), *leverage*, dan kekayaan pemerintah daerah (*wealth*) terbukti mempengaruhi tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Sementara itu, mengukur tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah secara online tidak menunjukkan variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) atau tipe pemerintahan (*type*).

Temuan Trisnawati & Achmad, (2013) menunjukkan variabel kompetisi politik (*POLCOM*), ukuran pemerintah daerah (*SIZE*), rasio pembiayaan utang (*LEV*), dan kekayaan pemerintah daerah (*WEALTH*) mempengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Sedangkan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet tidak dipengaruhi oleh variabel tipe pemerintah daerah atau opini audit.

Temuan Medina, (2012) menunjukkan variabel *size*, kompleksitas pemerintahan (*TYPE*) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada website pemerintah daerah. Sementara, variabel *leverage* dan pendapatan per kapita (*INC*) memiliki pengaruh negatif terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada website pemerintah daerah. Sementara itu, informasi keuangan yang terdapat pada website pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh variabel rasio kemandirian daerah (*INDEP*).

Penelitian ini yaitu pengembangan dari penelitian Adhiputra, Utama, & Rossitea, (2018), berjudul *Transparency of Local Government in Indonesia*.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini hanya 2 (dua) dari 4 (empat) variabel independen yang digunakan dalam penelitian sebelumnya oleh Adhiputra, Utama, & Rossitea, (2018) yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan 1 (satu) variabel lain yakni rasio pembiayaan utang merupakan variabel yang dipakai dalam penelitian Pranaswati & Kiswanto, (2020).

Sementara itu, penelitian ini diteliti dikarenakan adanya *research gap* pada penelitian terdahulu antara lain Octavia, (2022); Yudistira & Rohman, (2022); Nosihana & Yaya, (2016); Hasibuan & Muid, (2021); Krah & Mertens, (2020); Medina, (2012); Trisnawati & Achmad, (2013) mengemukakan ukuran pemerintah terdapat dampak positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Namun, tidak sama dengan penelitian yang dilakukan Adhiputra, Utama, & Rossitea, (2018), yang menunjukkan ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

Octavia, (2022); Nosihana dan Yaya (2016); Adhiputra, Utama, & Rossitea, (2018); berpendapat pengaruh positif opini audit terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pranaswati dan Kiswanto (2020), menemukan kualitas laporan keuangan daerah tidak mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah provinsi.

Nosihana & Yaya (2016) dan Trisnawati & Achmad (2013), menjelaskan kecenderungan positif dalam keterkaitan antara *leverage* dan transparansi pelaporan keuangan. Pranaswati & Kiswanto (2020) mengemukakan bahwa tidak ada keterkaitan antara rasio pembiayaan utang (*leverage*) dan transparansi pelaporan keuangan. Sedangkan, Medina (2012) menjelaskan bahwa variabel

*leverage* memiliki dampak negatif terhadap aksesibilitas akses informasi keuangan di situs pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan dan hal inilah yang memotivasi peneliti untuk melanjutkan penelitian sebelumnya yang akan dilakukan pada pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat jika ingin mengetahui transparansi laporan keuangan, publik diharapkan dapat memperoleh informasi laporan keuangan dengan cara mencari tahu melalui situs resmi pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Adhiputra, Utama, & Rossitea, (2018) yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel independen rasio pembiayaan utang dan menghapus variabel independen lain yaitu tingkat respon pemerintah daerah dan lingkungan politik terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penambahan variabel independen rasio pembiayaan utang ini dikarenakan semakin tinggi rasio pembiayaan utang, maka semakin tinggi kepercayaan terhadap pihak luar (kreditur) oleh pemerintah daerah (debitur) yang dapat menimbulkan pengawasan ketat yang ditetapkan oleh kreditur yang membuat pemerintah daerah semakin perlu dan wajib untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara transparan.

Peneliti menghapus 2 (dua) variabel independen lainnya dengan alasan bahwa indikator yang digunakan variabel independen itu dalam pengukurannya sudah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bersifat

akuntabel serta dapat mendorong pemerintah untuk mempublikasikannya kepada publik.

Alasan peneliti menambahkan objek penelitian yaitu menjadi pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu karena Indonesia itu merupakan negara yang luas yang tidak hanya mempunyai pemerintah provinsi saja, melainkan juga memiliki pemerintah kabupaten/kota yang sangat melimpah. Masing-masing pemerintah daerah juga mempunyai website pemerintah daerah yang digunakan untuk melaporkan apa saja mulai dari kegiatan, kinerja, bahkan sampai laporan keuangan. Maka dari itu peneliti ingin melihat seberapa tinggi tingkat transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, untuk dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menarik topik penelitian dengan judul *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2020”*.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, sehingga ditemukan identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang rendah dapat meningkatkan kemungkinan kebocoran serta menghambat kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dan kesejahteraan publik. Dilihat bukti empiris dari Tabel 1.1 Keteraksesan Website Pemerintah Daerah.
2. Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang diperlukan untuk didefinisikan sebagai tolak ukur untuk suatu pencapaian tujuan penelitian ini. Sehingga peneliti memberi batasan masalah antara lain :

1. Hanya ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan rasio pembiayaan utang terhadap transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah saja yang dipertimbangkan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini mengarah pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang mencapai 542 pemerintah daerah pada tahun 2020.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada konteks yang sama, beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana ukuran pemerintah daerah mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Menganalisis bagaimana kualitas laporan keuangan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Menganalisis bagaimana rasio pembiayaan utang mempengaruhi keterbukaan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

### **1.6.1 Teoritis**

Bermanfaat dari sudut pandang pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini dapat menginformasikan dan mendeskripsikan data faktual, yang dilengkapi untuk kebutuhan masukan dan perencanaan program masa depan terkait dengan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dan digunakan sebagai dasar bagi perkembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya di bidang ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik terkait transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

### **1.6.2 Praktis**

#### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Sebagai masukan untuk manajemen, berguna untuk memperbaiki kebijakan perusahaan atas transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas yang bersangkutan dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan.

#### **2. Bagi Universitas**

Sebagai masukan bagi institusi agar praktik pembelajarannya lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas belajar dan hasil



belajar mahasiswa serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Penulis

Sebagai sarana memperluas ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk memperdalam ilmu, serta mampu menerapkan teori yang diperoleh di perguruan tinggi mengenai transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam akuntansi sektor publik.

## 1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

## 1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun secara rinci menjadi 5 bab, antara lain :

### **BAB I   Pendahuluan**

Mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II   Landasan Teori**

Mencakup kajian teori yang mendasari penelitian, membahas beberapa hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir yang menjabarkan hubungan antar variabel penelitian, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III   Metode Penelitian**

Mencakup waktu dan wilayah penelitian dilakukan, jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel dalam

penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, menjelaskan variabel penelitian, menjelaskan definisi operasional variabel, serta menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV Analisis Data dan Pembahasan**

Menjelaskan terkait analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah yang akan diteliti dengan adanya penjabaran data, pengujian statistik, dan analisis hasil penelitian. Interpretasi penelitian memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

#### **BAB V Penutup**

Memberikan pembahasan umum penelitian menurut hasil analisis pada bab IV, sehingga dapat ditarik keputusan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Signalling**

Menurut Wilopo, (2017) dalam pemerintahan, teori *signalling* dapat dipandang sebagai pemerintah yang bertindak sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah dipercayakan oleh masyarakat untuk mengelola kekayaannya dan bertanggung jawab untuk memberikan informasi atau sinyal kepada masyarakat sebagai bentuk kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh tekanan dari masyarakat dalam memberikan informasi tentang kinerja dan pencapaian pemerintah (Ratmono, 2015 dalam Khasanah, Yuhertiana, & Budi, 2017).

Teori *signalling* menerangkan memberi tanda (*signal*) keberhasilan atau kegagalan kepada pemilik (*principal*) melalui cara manajemen (*agent*). *Signal* tersebut berupa data tentang tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi kebutuhan pemilik. Teori *signal* berasal dari konsep asimetri informasi, yang menerangkan tentang perbedaan ketersediaan informasi dapat mengganggu pasar normal dan bisnis dalam beberapa transaksi ekonomi (Nainggolan & Purwanti, 2016).

Teori *signalling* menerangkan pemerintah yang bertanggung jawab serta amanah dalam membangun negeri ini mengarah pada masa depan yang lebih maju akan membagikan *signal* yang baik pada warga. Implementasinya ialah melalui metode menyajikan laporan keuangan yang tepat, pengungkapan data kinerja pemerintah secara transparan, kenaikan pelayanan warga serta

penyajian pencapaian serta kinerja keuangan yang sederhana serta menarik bagi pengguna (Hilmi dan Martani, 2012).

Menampilkan seluruh data keuangan dengan detail menunjukkan upaya dari pemerintah daerah untuk menjadi lebih transparan dalam mengelola pemerintahan mereka. Hal ini direspon positif oleh masyarakat yang ingin mendukung pemerintah dalam memajukan dan membangun negara (Nosihana & Yaya, 2016).

### **2.1.2 Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Transparansi merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem akuntabilitas, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:105). Transparansi mengacu pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan keuangan daerah dalam pengertiannya. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki hak yang adil dalam mengakses data tentang pengelolaan keuangan yang relevan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat (Astuti, 2020).

Transparansi menjadi komponen pokok dari *good governance* sehingga mengharuskan semua pejabat membuka ruang untuk publik berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik, menyediakan akses dan memberikan informasi yang andal, jujur, dan tidak diskriminatif, sebagaimana tersedia untuk umum maupun pribadi, baik perlu maupun tidak (Adhiputra, Utama, & Rossitea, 2018).

Menurut Ratmono I. W. (2015), kejelasan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk transparansi yang penting bagi masyarakat. Transparansi ini tergantung pada kemudahan akses publik

terhadap laporan keuangan. Di samping itu, transparansi juga dapat diartikan sebagai tersedianya informasi yang memadai dan mudah dipahami oleh penggunanya (Muhtar, 2017 dalam Octavia, 2022).

Ketika tidak ada transparansi publik, maka akan terjadi akibat buruk yang merugikan masyarakat secara luas. Konsekuensi buruk tersebut mencakup distorsi dalam pengalokasian sumber daya, ketidakadilan terhadap publik, munculnya tindak korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan penyalahgunaan wewenang (Rahmawati & Mahmud, 2016).

Laporan keuangan dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas bagaimana keuangan dari daerah digunakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi tolok ukur kinerja pemerintah yang harus menjadi pertimbangan dalam membuat perencanaan keuangan akhir tahun (Christina, 2016).

Tujuan umum dari laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi kepada pengguna yang akan membantu mereka membuat dan mengevaluasi keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya, seperti neraca, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan entitas pelapor. Data ini dapat diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah untuk kedepannya (Christina, 2016).

Transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan analisis sensitivitas dilakukan untuk menguji apakah pengukuran variabel dependen akan menghasilkan temuan yang sama ketika pengukuran lain digunakan dengan variabel independen dalam model penelitian. Transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan skor yang dikembangkan oleh Garcia dan Garcia (2010). Dengan skor nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1, sehingga skor yang didapatkan mempunyai total nilai maksimal yaitu 16,5 (Adhiputra, Utama, & Rossitea, 2018).

Kelebihan menggunakan uji sensitivitas dalam mengukur variabel transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, prediksi yang lebih andal, karena data skor diambil sesuai dengan tahun penelitian, sehingga membantu pengambil keputusan mengidentifikasi dimana harus melakukan perbaikan dimasa depan. Serta memberikan tingkat kredibilitas yang lebih tinggi, dengan menyampaikan data dan hasil yang didapat (Adhiputra, Utama, & Rossitea, 2018).

### **2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah untuk mengukur sumber daya perekonomian yang menjadi hak pemerintah daerah sebagai imbas dari peristiwa lampau dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi masa depan. Ukuran Pemerintah Daerah yaitu besar kecilnya pemerintahan daerah (Adhiputra, Utama, & Rossitea, 2018).

Pemerintah daerah yang besar memiliki banyak sumber daya dan transaksi keuangan yang signifikan, sehingga pemerintahan tersebut akan

diperhatikan dengan lebih cermat. Lebih banyak laporan keuangan harus disampaikan untuk mencegah ketidakseimbangan informasi karena pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang besar lebih kompleks (Trisnawati & Achmad, 2013).

Ukuran pemerintah daerah adalah sejauh mana suatu entitas dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran menggunakan beberapa tolak ukur. Ukuran pemerintah ditentukan oleh total aset karena jumlahnya relatif normal dibandingkan dengan basis penelitian lain (Khasanah, Yuhertiana, & Budi, 2017).

Ukuran pemerintah daerah dinilai dari total aset pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang besar perlu lebih transparan dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik dengan mengungkapkan informasi berlanjut dalam laporan keuangannya. Penggunaan sumber daya pada kesepakatan besar, dikarenakan tingginya total aset, sehingga pengelolaan dan pemeliharaan aset yang lebih baik juga diperlukan (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Penelitian Medina (2012) menunjukkan ukuran pemerintah daerah mempengaruhi secara signifikan terhadap ketersediaan data keuangan melalui website pemerintah daerah. Transparansi laporan keuangan melalui internet dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah dan total asetnya (Trisnawati & Achmad, 2013).

#### **2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan wajar perusahaan,

hasil keuangan dan arus kas adalah laporan keuangan memiliki kualitas baik. Pemerintah daerah diharapkan bisa mencapai transparansi pengelolaan keuangan daerah jika pemerintah daerah yang mempunyai laporan keuangan konsisten dengan spesifikasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Nosihana dan Yaya, 2016).

Kualitas laporan keuangan daerah merupakan penilaian atas penyusunan dan penyajian LKPD sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI disajikan berbentuk opini audit pemerintah daerah. Opini audit ialah parameter kualitas laporan keuangan yang termasuk dalam tersajinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tingkatan opini antara lain: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak menyatakan pendapat (TMP), dan opini tidak wajar (TW) (Adhiputra, Utama, & Rossitea, 2018).

Penyajian laporan keuangan sangat baik jika pemerintah daerah mengeluarkan Opini WTP. Pemerintah daerah dengan laporan keuangan yang baik lebih cenderung mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui internet untuk mengindikasikan peningkatan akuntabilitas (Styles & Tennyson, 2007).

Penelitian Styles & Tennyson, (2007) membuktikan memperoleh penghargaan untuk praktik pelaporan keuangan yang baik, yang biasanya banyak yang menyajikan laporan keuangan di internet. Tetapi tidak seperti Nosihana & Yaya (2016) menunjukkan opini audit tidak memengaruhi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah pada website.



### **2.1.5 Rasio Pembiayaan Utang**

Rasio pembiayaan utang menggambarkan kapasitas pemerintah untuk menjamin sumber daya yang diperolehnya dalam menyediakan layanan dan proyek untuk masyarakat setempat baik sekarang maupun masa depan yang akan datang. Ini melibatkan hubungan antara pemerintah dan pemberi pinjaman, di mana semakin tinggi indeks pembiayaan pinjaman, semakin ketat pengawasan pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman dalam penggunaan dana yang dipinjam dan kemampuan mereka untuk mengembalikannya di kemudian hari (Nosihana & Yaya, 2016 dalam Pranaswati & Kiswanto, 2020).

Kreditor akan terus memantau bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan dana pinjaman serta mengevaluasi kesanggupan mereka untuk membayar kembali utangnya. pemerintah daerah harus menanggung biaya yang cukup besar untuk memenuhi persyaratan pengawasan kreditur karena tingginya rasio pembiayaan utang yang dikelola (Trisnawati & Achmad, 2013).

Rasio pembiayaan utang adalah perbandingan antara utang dengan modal. Ketergantungan entitas terhadap pihak eksternal meningkat ketika rasio pembiayaan utang lebih tinggi, yang mengakibatkan penurunan kinerja keuangan tersebut. Penyajian informasi keuangan akan memudahkan kreditur dalam memantau kinerja pemerintah melalui media tradisional dan kontemporer seperti internet. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah lebih transparan ketika rasio pembiayaan utang lebih tinggi (Zimmerman, 1977).

Menurut Nosihana & Yaya, (2016); Trisnawati & Achmad, (2013), menunjukkan arah yang baik antara keterkaitan *leverage* dan transparansi pelaporan keuangan. Pranaswati & Kiswanto (2020) mengemukakan bahwa tidak ada keterkaitan antara transparansi pelaporan keuangan dengan rasio pembiayaan utang (*leverage*). Sementara itu, dalam penelitian Medina (2012) menjelaskan bahwa variabel rasio pembiayaan utang menghambat aksesibilitas informasi keuangan melalui website yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2. 1  
Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yudistira dan Abdul Rohman (2022)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD di Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan 2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Tingkat Respon Pemerintah, dan Lingkungan Politik.</li> <li>- Variabel Dependen : Transparansi Pemerintah Daerah.</li> <li>- Populasi : Seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2018 dan 2019.</li> <li>- Sampel : 68 Pemerintah Daerah.</li> <li>- Teknik analisis data : Analisis Regresi Logistik</li> </ul>	Ukuran Pemerintah Daerah ( <i>SIZE</i> ) dan Lingkungan Politik ( <i>POLITICS</i> ) memiliki pengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Namun, Kualitas Laporan Keuangan ( <i>OPINI</i> ) dan Tingkat Respon ( <i>ACCRUAL</i> ) berdampak negatif pada transparansi keuangan pemerintah daerah.
2.	Muhammad Fadhly Rizky Octavio (2022)	Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, dan Kematangan e-</li> </ul>	Ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan kematangan <i>e-Government</i> mempengaruhi

		(Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia di Tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi)	<p><i>Government</i> Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Dependen : Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.</li> <li>- Populasi : Seluruh Pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada Tahun 2021.</li> <li>- Sampel : 541 Pemerintah Daerah.</li> <li>- Teknik analisis data : SEM.</li> </ul>	transparansi pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia.
3.	Rizky Novanda Hasibuan dan Dul Muid (2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pemerintah (Wilayah Provinsi di Pulau Jawa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah, Tingkat Respon Pemerintah Daerah, dan Lingkungan Politik Pemerintah Daerah.</li> <li>- Variabel Dependen : Transparansi Pemerintah.</li> <li>- Populasi : Pemerintah daerah (provinsi) di pulau Jawa selama periode 2013-2018.</li> <li>- Sampel : 32 dari 6 Provinsi di Pulau Jawa.</li> <li>- Teknik analisis data : Analisis Statistik Deskriptif</li> </ul>	Ukuran Pemerintah Daerah dan Lingkungan Politik Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan pada Transparansi Pemerintah Daerah. Sedangkan, Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Respon Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah.
4.	Adelina Chairani, Wahyudi Tertiaro, dan Sari Rela (2021)	Factors Affecting Disclosure Of Financial Statements On Local Government	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: Persaingan Politik, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, dan Jumlah Penduduk.</li> <li>- Variabel Dependen : Pengungkapan Laporan Keuangan</li> </ul>	Persaingan politik dan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah.

		Websites In Indonesia	<p>pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Populasi : Seluruh provinsi di Indonesia tahun 2016-2018.</li> <li>- Sampel : 34 Pemerintah Daerah.</li> <li>- Teknik analisis data: Regresi Linear Berganda</li> </ul>	Lain halnya dengan rasio kemandirian daerah dan jumlah penduduk mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah di Indonesia secara positif.
5.	Redeemer Krah dan Gerard Mertens (2020)	Democracy and Financial Transparency of Local Government in Sub-Saharan Africa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: Demokrasi, Ideologi politik, ukuran pemerintah daerah.</li> <li>- Variabel Dependen : Transparansi keuangan.</li> <li>- Populasi : Seluruh pemerintah daerah di Afrika Sub-Saharan selama periode 20 tahun (1995-2014).</li> <li>- Sampel : 43 pemerintah daerah</li> <li>- Teknik analisis data : Analisis deskriptif dan multivariate</li> </ul>	Demokrasi terbukti meningkatkan transparansi keuangan pemerintah daerah. Ideologi politik berdampak pada transparansi secara signifikan. Ukuran pemerintah daerah memiliki hubungan positif signifikan dengan transparansi keuangan pemerintah daerah.
6.	Happy Valentina Pranaswati dan Kiswanto (2020)	Determination Transparency Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: Realisasi pungutan pajak daerah, Rasio pembiayaan utang (leverage), Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Tingkat kekayaan daerah, Kompetisi politik, Kekuatan partai politik, Lama jabatan kepala daerah.</li> <li>- Variabel Dependen : Transparansi Pelaporan Keuangan.</li> <li>- Populasi : Seluruh pemerintah provinsi di Indonesia tahun</li> </ul>	Realisasi penerimaan pajak, tingkat kekayaan daerah dan kompetisi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Leverage, kualitas laporan keuangan, kekuatan partai politik dan lama jabatan kepala daerah tidak memiliki pengaruh terhadap

			<p>anggaran 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel : 34 provinsi</li> <li>- Teknik analisis data : Regresi Berganda</li> </ul>	transparansi pelaporan keuangan.
7.	I Made Pradana Adiputra, Sidharta Utama, & Hilda Rossieta (2018)	Transparency of Local Government in Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: Ukuran pemerintah daerah, Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Respon pemerintah daerah, lingkungan politik.</li> <li>- Variabel Dependen : Transparansi pemerintah daerah.</li> <li>- Populasi : Seluruh pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016.</li> <li>- Sampel : 34 provinsi</li> <li>- Teknik analisis data : Analisis regresi berganda</li> </ul>	Kualitas pelaporan keuangan melalui opini audit dan lingkungan politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Besarnya respon pemerintah daerah dan pemerintah daerah terhadap peraturan tidak mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia.
8.	Indra Agung Wilopo (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: Pendapatan asli daerah, Ukuran Pemerintah daerah, Kompleksitas pemerintahan, Rasio pembiayaan hutang, Belanja daerah, Tingkat kesejahteraan masyarakat, dan Kualitas laporan keuangan.</li> <li>- Variabel Dependen : Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website.</li> <li>- Populasi : 457 Pemerintah daerah tahun 2013.</li> <li>- Sampel : 211 Pemerintah Daerah.</li> </ul>	Hanya faktor tingkat kesejahteraan masyarakatlah satu satunya faktor yang menunjukkan berhubungan positif signifikan dalam pengungkapan informasi laporan keuangan yang transparan melalui website pemerintah daerah, sedangkan faktor lain tidak menunjukkan dampak yang signifikan.

			- Teknik analisis data : Regresi Logistik & Regresi Berganda	
9.	Ariefia Nosihana dan Rizal Yaya (2016)	Internet Financial Reporting dan Faktor- Faktor yang Mempenga ruhnya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia	- Penelitian Kuantitatif - Variabel Independen: Kompetisi Politik, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Pembiayaan Utang, Kekayaan Pemerintah Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, dan Opini Audit. - Variabel Dependen : Pengungkapan IFR melalui <i>E- Government</i> . - Populasi : Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia pada tahun 2014. - Sampel : 175 Pemerintah Kabupaten/Kota. - Teknik analisis data : Analisis Regresi Linear Berganda	Kompetisi politik dan Ukuran Pemerintah daerah mempengaruhi publikasi laporan keuangan melalui internet. Tetapi, tidak terbukti dengan rasio pembiayaan utang ( <i>leverage</i> ), kekayaan Pemerintah daerah, tipe Pemerintah daerah dan opini audit mempengaruhi secara signifikan terhadap internet financial reporting melalui <i>e- government</i> .
10	Ria Aini Rahmawati dan Amir Mahmud (2016)	Faktor- Faktor Yang Mempenga ruhi Transparen si Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Penelitian Kuantitatif - Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kemakmuran, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Anggota DPRD. - Variabel Dependen : Transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. - Populasi : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa sebanyak 118 Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2013. - Sampel : 73 Kabupaten/Kota. - Teknik analisis data :	Ukuran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, jumlah anggota DPR tidak mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan daerah, dan tingkat kemakmuran memiliki pengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.

			Analisis Regresi Linear Berganda	
11	Christina (2016)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Hutang, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Hutang, dan Belanja Daerah.</li> <li>- Variabel Dependen: Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.</li> <li>- Populasi : Seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 tahun 2015.</li> <li>- Sampel : 80 Kabupaten/Kota.</li> <li>- Teknik analisis data : Analisis Regresi Logistik.</li> </ul>	Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Pembiayaan Hutang berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
12	Ghaniyyu Mintotik Waliyyani dan Amir Mahmud (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: <i>Size</i> (Ukuran Pemerintah Daerah), Umur Pemerintah Daerah, Temuan Audit, <i>Leverage</i>, dan <i>Intergovernmental Revenue</i>.</li> <li>- Variabel Dependen : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.</li> <li>- Populasi : Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2013 berjumlah 542.</li> <li>- Sampel : 113 LKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.</li> <li>- Teknik analisis data : Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul>	Karakteristik pemerintah, Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Variabel <i>size</i> , temuan audit, <i>leverage</i> , dan <i>intergovernmental revenue</i> tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

13	Ikhlas Wau Ratmono (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting oleh Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: Kompetisi Politik, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio kemandirian finansial, Pendapatan per kapita, Opini audit.</li> <li>- Variabel Dependen : Ketersediaan dan Keteraksesan IFR.</li> <li>- Populasi : Pemerintah Kota dan Kabupaten di Pulau Jawa.</li> <li>- Sampel : 112 Pemerintah Daerah.</li> <li>- Teknik analisis data : Analisis Regresi Logistik Ordinal (PLUM) dan Regresi Berganda.</li> </ul>	Uji Regresi logistik ordinal bahwa pendapatan per kapita dan opini audit memiliki pengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah dan kemandirian finansial pemda tidak berpengaruh terhadap ketersediaan IFR oleh pemda. Uji Regresi berganda bahwa kemandirian finansial pemda memiliki pengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah, sedangkan kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, pendapatan per kapita, dan opini tidak berpengaruh terhadap keteraksesan IFR pada website pemerintah daerah.
14	Aditya Rahman, Sutaryo, & Agus Budiartanto, (2013)	Determinan <i>Internet Financial Local Government Reporting</i> di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kuantitatif</li> <li>- Variabel Independen: <i>Political competition, Local Government Size, Leverage, Local Government Wealth, Local Government Type.</i></li> <li>- Variabel Dependen :</li> </ul>	Variabel kompetisi politik ( <i>political competition</i> ), <i>leverage</i> , dan kekayaan pemerintah daerah ( <i>wealth</i> ) terbukti mempengaruhi



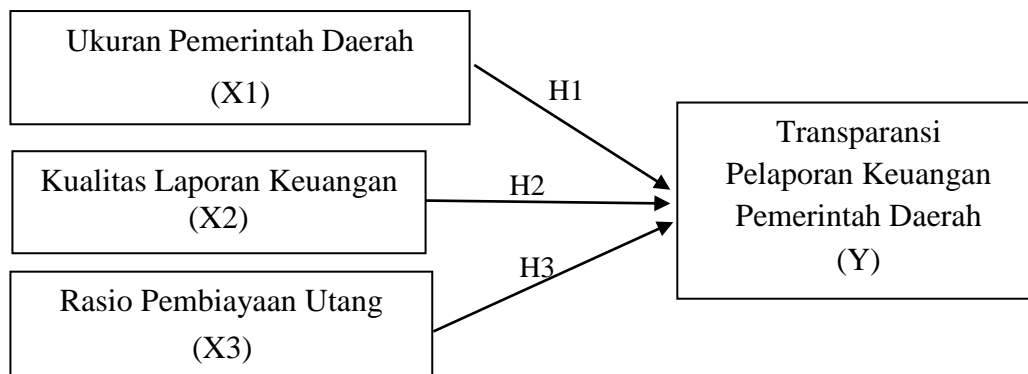
			<p>Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet (<i>Internet Financial Local Government Reporting/IFLGR</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Populasi : Pemerintah Kota (Kabupaten) di Indonesia tahun 2010 berjumlah 497.</li> <li>- Sampel : 173 LKPD Kabupaten/Kota.</li> <li>- Teknik analisis data : Analisis <i>Binary Logistic Regression</i>.</li> </ul>	<p>tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Sedangkan, variabel ukuran pemerintah daerah (<i>size</i>) dan tipe pemerintahan (<i>type</i>) tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet.</p>
15	Trisnawati & Achmad, (2013)	Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet.	<p>Penelitian Kuantitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Independen: Kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan utang (<i>leverage</i>), kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan opini audit.</li> <li>- Variabel Dependen : Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</li> <li>- Populasi : Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2012</li> <li>- Sampel : 173 LKPD Kabupaten/Kota.</li> <li>- Teknik analisis data : Analisis <i>Logistic Regression</i>.</li> </ul>	<p>Kompetisi politik (<i>POLCOM</i>), ukuran pemerintah daerah (<i>SIZE</i>), rasio pembiayaan utang (<i>LEV</i>), dan kekayaan pemerintah daerah (<i>WEALTH</i>) berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Sedangkan variabel tipe pemerintah daerah dan opini audit tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.</p>
16	Febri Medina, (2012)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi	<p>Penelitian Kuantitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Independen: ukuran, rasio kemandirian, rasio pembiayaan utang, kompleksitas pemerintahan, pendapatan per</li> </ul>	<p>Variabel <i>size</i>, kompleksitas pemerintahan (<i>TYPE</i>) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap aksesibilitas</p>

	Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia.	kapita. - Variabel Dependen : - Transparansi ketersediaan dan aksesibilitas Pemerintah Daerah. - Populasi : 524 Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2009 - Sampel : 257 LKPD provinsi dan Kabupaten/Kota. - Teknik analisis data : Analisis <i>Logistic Regression</i> .	informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan, variabel <i>leverage</i> dan pendapatan per kapita ( <i>INC</i> ) berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs pemerintah daerah. Dan untuk variabel rasio kemandirian daerah ( <i>INDEP</i> ) tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.
--	---	--	--

### 2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dijelaskan dampaknya variabel bebas terhadap variabel terikat adalah :

Gambar 2. 1  
Kerangka Berfikir



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut teori *signal*, mengkaji kaitannya pemerintah (*agent*) dan masyarakat (*principal*) yang membantu dalam meminimalisir ketimpangan informasi. Tindakan yang dapat diambil dengan memberikan *signal* kepada publik melalui transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, selaras dengan ukurannya, dan lebih lengkap (Ratmono I. W., 2015).

Karena transfer kekayaan yang substansial dan besarnya ukuran pemerintah daerah, pengawasan pemerintah daerah menjadi lebih ketat. Selain itu, besarnya pemerintah daerah juga mempunyai kompleksitas yang tinggi dalam mengelola dana mereka, sehingga membutuhkan lebih banyak pengungkapan data keuangan untuk mencegah ketidakseimbangan data (Trisnawati dan Achmad, 2013).

Karena banyaknya aset yang dikuasai pemerintah, pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan. Hal ini akan memungkinkan publik untuk diberikan sinyal, supaya dapat memeriksa apakah pemerintah bekerja dilakukan sesuai dengan prosedur yang menghilangkan asimetri informasi (Debreceeny, Gray, & Rahman, 2002).

Sebagai proksi skala ukuran pemerintah daerah, Sumarjo (2010) & Lesmana (2010) memakai total aset pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena “aset” adalah sumber daya keuangan yang dikelola dan/atau diklaim

oleh pemerintah, serta hasil dari kejadian sebelumnya dan juga keuntungan yang diperoleh kembali di masa depan. Menurut Ratnasari (2016), tingkat pengungkapan wajib LKPD provinsi dipengaruhi secara positif signifikan oleh ukuran pemerintah daerah.

Octavia, (2022); Yudistira & Rohman, (2022); Hasibuan & Muid, (2021); Chairani, Tertiarto, & Rela, (2021); Krah & Mertens, (2020); Wilopo, (2017); Rahmawati & Mahmud, (2016) dan Medina, (2012), yang menemukan ukuran pemerintah daerah secara positif signifikan berdampak dalam meningkatkan transparansi pemerintah daerah. Maka diperoleh hipotesis penelitian ini yaitu :

H1. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

#### **2.4.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut teori *signal*, pemerintah daerah yang memperoleh hasil opini WTP umumnya mengarah untuk mempublikasikan laporan keuangannya, sehingga publik mendapatkan sinyal untuk dapat melihat seberapa baik kinerja pemerintah daerah (Pranaswati & Kiswanto, 2020).

Teori *signal* juga mengkaitkan masyarakat yang membutuhkan pemerintah (*principal*), untuk membuktikan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah auditor yang memverifikasi validitas representasi. Hasil audit berupa opini audit memberikan gambaran tentang kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah (Trisnawati & Achmad, 2014).

Berdasarkan hasil audit, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi publik akan disediakan melalui situs resmi pemerintah daerah oleh pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP (Nainggolan & Purwanti, 2016).

Yudistira & Rohman, (2022); Octavia, (2022); Hasibuan & Muid, (2021); Krah & Mertens, (2020); Adhiputra, Utama, & Rossitea, (2018) menemukan kualitas laporan keuangan melalui opini audit memiliki pengaruh pada transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara positif. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H2. Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

#### **2.4.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Rasio pembiayaan utang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Pengalihan kekayaan dari kreditur ke pemegang saham perusahaan semakin lancar, semakin tinggi rasio pembiayaan utang pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah dengan rasio pembiayaan utang yang tinggi wajib memenuhi lebih banyak tanggung jawab untuk berkomunikasi secara efektif dengan kreditur jangka panjang dan memberikan informasi yang akurat (Trisnawati & Achmad, 2013).

Pemberi pinjaman bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman dan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi

kewajiban mereka. Berdasarkan teori *signal* kreditur sebagai *principal*, yang menginginkan pemerintah daerah sebagai *agent* untuk menyediakan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dengan menerbitkan laporan keuangan dapat membantu kreditur memperoleh informasi tentang masyarakat dan memantau kegiatan masyarakat dalam akuntansi untuk penggunaan dana pinjaman (Trisnawati & Achmad, 2013).

Kreditur dapat memantau kinerja pemerintah dengan bantuan laporan keuangan yang diungkapkan melalui media konvensional maupun modern seperti internet. Dengan demikian, pentingnya pelaporan keuangan yang transparan oleh pemerintah daerah meningkat dengan rasio pembiayaan utang (Zimmerman, 1977).

Rahman, Sutaryo, & Budiarmanto, (2013) dan Trisnawati & Achmad, (2013) yang menjelaskan bahwa variabel *leverage* memiliki pengaruh secara positif pada pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H3. Rasio pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian**

Penelitian dilakukan kurang lebih selama bulan Desember 2022 hingga Maret 2023. Di Indonesia, 542 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah penelitian. Data yang perlu dikumpulkan peneliti diambil dari beragam sumber antara lain internet, publikasi ilmiah, buku, dan sumber lain yang ada kaitannya dengan topik penelitian, sehingga lokasi dilaksanakannya penelitian tidak bisa dikatakan lebih terperinci. Menjalankan penelitian dengan proses menghimpun serta menganalisis data sekunder dari hasil pencarian dokumen di situs web setiap pemerintah daerah.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:7) yang berpendapat, jenis kuantitatif adalah jenis studi eksperimen dan survey. Jenis ini juga dikenal dengan jenis tradisional, karena telah digunakan sejak lama, menjadi semacam penelitian tradisional.

Disebut jenis kuantitatif, karena jenis ini memerlukan data berbentuk angka dan statistik deskriptif, serta menarik kesimpulan dengan berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sehingga dapat dibuktikan atau tidak. Hipotesis membutuhkan variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian (Sugiyono, 2013:7).

### 3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi yaitu domain umum merujuk pada kumpulan objek atau subjek yang menunjukkan karakter dan spesifikasi khusus yang diterapkan peneliti untuk mempelajarinya serta menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:80). Populasi yang akan diteliti meliputi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk provinsi, kabupaten/kota yang berjumlah 542 pemerintah daerah pada tahun 2020.

#### 3.3.2 Sampel

Sugiyono (2013:81) berpendapat, sampel yaitu sebagian dari total dan spesifikasi populasi. Untuk penelitian ini, peneliti melakukan pengujian terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan mengambil data dari 516 Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 3. 1  
Pemilihan Sampel Penelitian

Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2020	542
Dikurangi :	
Website Pemerintah Daerah tidak bisa diakses	(20)
Tidak tersedianya data berupa Neraca pada Laporan Keuangan yang dipublikasikan DJPK Kementerian Keuangan	(1)
Tidak tersedianya data statistik lengkap variabel berupa kewajiban dan asset	(4)
Belum mendapatkan opini atas LKPD dari BPK RI	(1)
<b>Jumlah Sampel</b>	<b>516</b>

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023



### 3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* yakni dengan cara memilih kumpulan sampel yang sesuai dengan kriteria yang mendasarinya (Sugiyono, 2013:85). Berikut kriteria pemerintahan daerah Indonesia, antara lain :

1. Pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki website resmi, masih aktif dan bisa diakses.
2. Menyediakan laporan keuangan berupa Neraca yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
3. Menyediakan seluruh data statistik lengkap berupa kewajiban dan aset untuk keseluruhan variabel pada pemerintah daerah di Indonesia.
4. Pemerintah daerah sudah memperoleh opini atas LKPD dari BPK RI.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang ditambahkan bersumber yang dibuat orang lain, seperti buku, dokumen, foto, statistik, dan lain-lain, bukan data yang didapatkan langsung dari lapangan (Sugiyono, 2013:113).

Data Sekunder berupa informasi transparansi pelaporan keuangan yang didapat dari situs resmi tiap pemerintah daerah. Serta, data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Neraca yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, dan IHPS semester 1 tahun 2021 yang dipublikasikan oleh BPK RI.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ialah pencatatan kejadian masa lalu. Dokumen berbentuk teks, gambar, atau karya monumental seseorang (Sugiyono, 2013).

### **3.6 Variabel Penelitian**

Variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

#### **3.6.1 Variabel Terikat (Dependen Variabel)**

Sugiyono (2013:39) berpendapat, variabel terikat juga diartikan menjadi variabel output, kriteria, konsekuensi. Variabel dependen berarti variabel yang diberikan pengaruh atau diciptakan oleh variabel independen. Dalam studi ini variabel terikat yaitu Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

#### **3.6.2 Variabel bebas (Independen Variabel)**

Sugiyono, (2013:39) berpendapat, variabel yang memberikan dampak pada perubahan bahkan kemunculan variabel dependen disebut variabel bebas. Dalam tinjauan ini, variabel bebas antara lain Ukuran Pemerintah Daerah (X1), Kualitas Laporan Keuangan (X2), dan Rasio Pembiayaan Utang (X3).

### **3.7 Definisi Operasional Variabel**

Definisi Operasional Variabel merupakan definisi variabel yang dinyatakan dengan maksud persepsi, secara operasional, praktis, dan realistis dalam kerangka objek penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2013).

Tabel 3. 2  
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Keterbukaan pemerintah dalam menyediakan data mengenai tata kelola sumber daya publik kepada para pihak yang memiliki kepentingan, terutama masyarakat.</p> <p>(Adhiputra, Utama, &amp; Rossitea, 2018)</p>	<p><b>Analisis Sensitivitas :</b></p> <p>Analisis sensitivitas dilakukan untuk menguji apakah pengukuran variabel dependen akan menghasilkan temuan yang sama ketika pengukuran lain digunakan dengan variabel independen dalam model penelitian.</p> <p>Transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan skor yang dikembangkan oleh Garcia (2010).</p> <p>Skor nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Skor yang didapat mempunyai total nilai maksimal yaitu 16,5.</p> <p>(Adhiputra, Utama, &amp; Rossitea, 2018)</p>
2.	Ukuran Pemerintah Daerah	<p>Jumlah sumber daya perekonomian dimiliki atau dikendalikan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kejadian masa lalu. Oleh karena itu, manfaat perekonomian masa mendatang yang diharapkan tercapai.</p> <p>(Adhiputra, Utama, &amp; Rossitea, 2018)</p>	<p>Pengukuran Proksi :</p> $Size = Ln \text{ Total Aset}$ <p>Ln = Natural Logaritma</p> <p>(Adhiputra, Utama, &amp; Rossitea, 2018)</p>

3.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Menilai penyusunan dan penyajian LKPD terhadap temuan audit BPK RI yang tertuang sebagai opini audit pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan tingkat akuntabilitas keuangan yang tercermin dalam opini audit.  (Adhiputra, Utama, & Rossitea, 2018)	Opini audit bersifat bertingkat, yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP).  Pengukuran dengan variabel <i>dummy</i> : 1 = WTP 0 = Non WTP  (Adhiputra, Utama, & Rossitea, 2018)
4.	Rasio Pembiayaan Utang	Rasio yang mencerminkan perbandingan jumlah hutang yang diperoleh dari sumber eksternal terhadap modal yang dimiliki.  (Ratmono D. , 2013)	Rasio Pembiayaan Utang = $\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$ (Medina, 2012)

Berikut penjelasan dari pengukuran Uji Sensitivitas dalam pengungkapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 3  
Pengukuran Pengungkapan Transparansi

No	Kategori	Deskripsi	Skor
1	Informasi yang tercantum	Neraca	1
		Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1
		Laporan Arus Kas (LAK)	1
		Sistem Pencatatan	1
		Rencana Strategis (Renstra)	1
		Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	1
		Data tahun lalu	0,75
		Laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	0,75

		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1
2	Format yang digunakan	PDF	1
		.rar	0,75
		.jpeg	0,75
		Excel	0,5
		PPT	0,5
		Word	0,5
3	Interaksi dengan pengguna	Email	1
		Telepon	1
		Forum Diskusi	1
		Halaman Tautan	1
Sumber : Garcia dan Garcia (2010)			

### 3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah teknik yang berguna saat mengerjakan dan mengkaji data untuk memecahkan masalah bahkan hipotesis. Alat analisis yang digunakan ialah *Eviews 10* untuk semua penyajian dan telaah data. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, yang meliputi:

#### 3.8.1 Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas ketika total pengamatan didapat  $< 30$ , memiliki tujuan memeriksa apakah *error term* mendekati berdistribusi normal. Apabila total pengamatan yang didapat  $> 30$ , sehingga tidak diperlukan pengujian normalitas. Dengan alasan distribusi sampling *error term* mendekati normal (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011: 42).

Pengukuran pada penelitian ini yaitu *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ . Ini berarti data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ . Ini berarti data tidak berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Penggunaan Uji Multikolinearitas ialah memeriksa model regresi guna mengetahui hubungan antar variabel dependen. Pertimbangkan Multikolinearitas koefisien untuk setiap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah suatu model regresi memiliki Multikolinearitas, maka harus dilakukan pengujian *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Menilai dengan melihat angka *centered Variance Inflation Factor* (VIF) pada setiap variabel independen (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011).

Adapun kriteria pengambilan keputusan terkait uji Multikolinearitas adalah sebagai berikut :

- a. Apabila nilai VIF  $< 10$  atau nilai *tolerance*  $> 0,01$ . Artinya, tidak terjadi Multikolinearitas.
- b. Apabila nilai VIF  $> 10$  atau nilai *tolerance*  $< 0,01$ . Artinya, terjadi Multikolinearitas.
- c. Apabila koefisien korelasi setiap variabel bebas  $> 0,8$ . Artinya, terjadi Multikolinearitas. Tetapi jika koefisien korelasi setiap variabel bebas  $< 0,8$ , yang berarti tidak terjadi Multikolinearitas.

### 3. Uji Autokorelasi

Tujuan pengujian autokorelasi untuk menemukan korelasi kumpulan mekanisme pengamatan diatur oleh ruang atau waktu. Uji Autokorelasi hanya dipakai pada data *time series* atau runtut waktu. Menggunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengidentifikasi gejala autokorelasi dengan menentukan nilai *Durbin-Watson* (DW) (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011:40).

Menurut Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, (2011: 40) untuk mengecek adanya autokorelasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Memperhatikan nilai *t-statistik*,  $R^2$ , uji F, dan *Durbin-Watson* (DW).  
Jika nilai DW relatif kecil, maka terdapat masalah autokorelasi.
- b. Melakukan uji LM, yang merupakan metode *Breusch Godfrey*. Nilai F dan *Obs\*R-Square* adalah dasar dari metode ini.. Jika nilai *probability* dari *Obs\*R-Squared* melampaui tingkat signifikansi, maka  $H_0$  didukung. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan autokorelasi.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas ialah kondisi dimana tidak seluruh masalah yang timbul pada peran regresi populasi terdapat *variance* yang sama. Tujuan pengujian Heteroskedastisitas ialah memeriksa model regresi apakah timbul perbedaan *variance* dan *residual* antar observasi. Apabila *variance* dan *residual* suatu observasi konstan terhadap observasi lain,

dikatakan Homoskedastisitas, dan apabila *variance* tidak stabil, berarti Heteroskedastisitas, atau tidak untuk Heteroskedastisitas (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011: 36).

Verifikasi dijalankan menggunakan uji *Glejser*, ialah regresi tiap variabel bebas terhadap *residual absolute* sebagai variabel terikat. *Residual* ialah perbedaan antara nilai yang diamati dan diprediksi, dan nilai *absolut* ialah nilai mutlak. Uji *Glejser* berguna dalam meregresi nilai *absolute* dari *residual* variabel bebas. Heteroskedastisitas tidak terjadi, apabila nilai keyakinan uji *Glejser*  $> 0,05$  (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011).

### 3.8.2 Uji Ketepatan Model

#### 1. Uji F

Penggunaan uji F guna membuktikan variabel bebas memiliki pengaruh pada variabel terikat. Uji F disebut juga uji model keseluruhan dibutuhkan dalam memeriksa semua koefisien regresi berganda adalah nol atau model tersebut dapat diterima (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011:34). Menurut Ajija, Sari, Setianto, & Primanti (2011), aturan pengambilan keputusan antara lain:

- a. Jika  $F\text{-stat} > F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  tidak didukung dan  $H_a$  didukung. Artinya, variabel terikat mempengaruhi variabel bebas. Sebaliknya, jika  $F\text{-stat} < F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  didukung dan  $H_a$  tidak didukung. Artinya, variabel terikat tidak mempengaruhi variabel bebas.
- b. Jika  $p\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_0$  tidak didukung dan  $H_a$  didukung. Ini



berarti, variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, Jika  $p\text{-value} > \alpha$ , maka  $H_0$  didukung dan  $H_a$  tidak didukung. Ini berarti, variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## 2. Uji Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi dilihat dari seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen dalam menyatakan peralihan nilai variabel bebas. Nilai koefisien determinasi bervariasi dari 0 hingga 1. Nilai koefisien determinasi yang kurang artinya kesanggupan variabel dependen untuk menginterpretasikan *variance* variabel dependen sangat buruk, begitu pula sebaliknya (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011: 34).

Nilai yang hampir sama dengan 1, yang berarti variabel dependen memberikan hampir seluruh keterangan yang dibutuhkan untuk memproyeksikan variabel terikat. Penambahan variabel independen, tentu meningkatkan penggunaan adjusted  $R^2$  yang disesuaikan, ketika  $X > 1$ . Tidak masalah jika variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar pada variabel bebas. Dengan demikian, disarankan memerlukan nilai  $R^2$  ketika menilai model regresi mana yang paling bagus (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011).

### 3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression*) berguna dalam menanggapi persoalan pada penelitian ini. Regresi berganda disebut juga regresi majemuk yakni model regresi yang terdiri dari beberapa variabel bebas

(Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011: 31).

Persamaan Regresi penelitian ini menentukan sejauh mana variabel terikat dalam mempengaruhi variabel bebas. Variabel-variabel yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) variabel bebas seperti, ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dan rasio pembiayaan utang, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Persamaan regresi dapat diinterpretasikan seperti di bawah ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Ukuran Pemerintah Daerah

X2 = Kualitas Laporan Keuangan

X3 = Rasio Pembiayaan Utang

e = Error Term

### 3.8.4 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji t ialah uji koefisien estimator atau prediktor atau variabel independen. Penggunaan uji t dengan mengetahui variabel independen mempengaruhi sebagian variabel terikat, beranggapan bahwa variabel lain stabil. Uji t dijalankan dengan perimbangan t-stat dan t-tabel. Bila sebuah nilai t-stat > t-tabel,  $H_0$  tidak didukung dan  $H_1$  didukung (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011: 34).

Menurut Ajija, Sari, Setianto, & Primanti (2011), pengujian ini dapat dilaksanakan dengan cara lain dilihat dari nilai Prob. pada hasil regresi.

- a. Nilai *Probability* (prob)  $> 0,05$ , hipotesis tidak didukung. Artinya variabel independen secara signifikan tidak berpengaruh pada variabel dependen.
- b. Nilai *Probability* (prob)  $< 0,05$ , hipotesis didukung. Artinya variabel independen secara signifikan berpengaruh pada variabel dependen.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diambil berupa data keuangan dan non keuangan. Data penelitian diperoleh melalui website resmi setiap pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), dan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Sebanyak 542 pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2020 baik yang mewakili tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi sampel penelitian. Setelah melalui proses pengambilan data sesuai kriteria yang telah ditetapkan, maka sampel pada penelitian ini adalah 516 pemerintah daerah yang menggunakan metode *purposive sampling*. Berikut adalah sampel pemerintah daerah yang memenuhi kriteria dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Tabel 4. 1  
Ringkasan Pemilihan Sampel Penelitian

Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2020	542
Dikurangi :	
Website Pemerintah Daerah tidak bisa diakses	(20)
Tidak tersedianya data berupa Neraca pada Laporan Keuangan yang dipublikasikan DJPK Kementerian Keuangan	(1)
Tidak tersedianya data statistik lengkap variabel berupa kewajiban dan asset	(4)
Belum mendapatkan opini atas LKPD dari BPK RI	(1)
<b>Jumlah Sampel</b>	<b>516</b>

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa peneliti telah menggunakan sampel sebanyak 516 pemerintah daerah. Setelah itu, peneliti melakukan pengujian asumsi klasik dengan memasukkan seluruh 516 data yang telah terkumpul. Namun, hasil dari pengujian asumsi klasik menunjukkan Uji Normalitas menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, Uji Autokorelasi menunjukkan adanya gejala autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Oleh sebab itu, peneliti melakukan olah data kembali sebanyak 516 pemerintah daerah dengan memperbaiki data yang belum memenuhi uji asumsi klasik. Dengan metode *Diferensi* yang dilakukan pada setiap variabel baik variabel dependen maupun variabel independen. Sehingga dapat digunakan dalam memperbaiki data yang tidak memenuhi uji asumsi klasik, dan hasil uji asumsi klasik sudah terpenuhi semua.

## **4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data**

### **4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Dari 516 sampel pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota memuat nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari seluruh pengujian data kuantitatif dalam studi ini, baik variabel terikat maupun variabel bebas. Hasil dari statistik deskriptif dapat terlihat pada Tabel 4.2 yaitu, sebagai berikut :

Tabel 4. 2  
Hasil Statistik Deskriptif

Date: 05/14/23  
Time: 06:39  
Sample: 1 516

	Y	X1	X2	X3
Mean	5.528585	28.73009	0.906977	0.021846
Median	5.500000	28.57612	1.000000	0.011059
Maximum	13.50000	33.88554	1.000000	0.306975
Minimum	0.000000	24.63867	0.000000	-0.062921
Std. Dev.	3.591763	0.833818	0.290747	0.033698
Skewness	0.177335	0.946931	-2.802243	3.916264
Kurtosis	1.791639	8.279283	8.852564	24.71316
Jarque-Bera	34.09742	676.3371	1411.749	11455.41
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	2852.750	14824.73	468.0000	11.27235
Sum Sq. Dev.	6643.891	358.0551	43.53488	0.584812
Observations	516	516	516	516

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Eviews 10, 2023

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 4.2 diatas diketahui bahwa :

1. Ukuran Pemerintah Daerah (X1)

Variabel ukuran pemerintah daerah yaitu memiliki nilai median sebesar 28,57612. Dengan nilai rata-rata yang didapat yaitu 28,73009. Pemerintah daerah mempunyai ukuran yang berbeda-beda, berdasarkan hasil pengujian, nilai minimum diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 24,63867 yang merupakan daerah dengan aset terkecil. Sedangkan, nilai maksimum diperoleh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 33,88554 yang merupakan daerah dengan aset terbesar. Dilihat pada data tersebut, tingkat distribusi variabel ukuran pemerintah daerah nilai standar deviasi yaitu 0,833818. Hasil ini

menjelaskan bahwa variasi variabel ukuran pemerintah daerah di Indonesia adalah rendah.

## 2. Kualitas Laporan Keuangan (X2)

Nilai median variabel kualitas laporan keuangan yakni 1. Sementara itu, diperoleh nilai rata-rata adalah 0,906977. Pemeriksaan opini BPK masing-masing pemda menghasilkan hasil yang bervariasi, dengan 468 pemerintah daerah mendapatkan skor 1 dengan presentase 91% dan 48 pemerintah daerah mendapatkan skor 0 dengan presentase 9%. Hasil tersebut digunakan untuk menilai kualitas laporan keuangan. Terbukti, beberapa pemerintah daerah seperti Kabupaten Gunungkidul mendapatkan skor 1 untuk opini WTP dan skor 0 untuk opini yang selain WTP, seperti Kabupaten Kupang. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, laporan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah cukup memuaskan tetapi masih perlu beberapa penyempurnaan. Dengan standar deviasi sebesar 0,290747, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan terdistribusi secara merata. Karena standar deviasinya di bawah rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa data Kualitas Laporan Keuangan tidak dikelompokkan atau bervariasi.

## 3. Rasio Pembiayaan Utang (X3)

Variabel rasio pembiayaan utang menandakan nilai median adalah 0,011059. Dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 0,021846. Rasio Pembiayaan Utang yang membandingkan antara kewajiban dan aset setiap pemerintah daerah dengan hasil yang berbeda-beda, ditinjau dari hasil

pengujian bahwa rasio pembiayaan utang terkecil yaitu  $-0,062921$  dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Subang, memiliki nilai negatif karena mempunyai nominal kewajiban yang negatif. Dan, rasio pembiayaan utang terbesarnya yaitu  $0,306975$  dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio pembiayaan utang setiap pemerintah daerah berbeda-beda. Dari data diatas tingkat distribusi rasio pembiayaan utang dapat dilihat dari standar deviasi sebesar  $0,033698$ . Artinya, data Rasio Pembiayaan Utang bersifat berkelompok atau bervariasi karena standar deviasinya berada diatas nilai rata-rata.

#### 4. Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)

Variabel transparansi pelaporan keuangan menandakan pada nilai median sebesar 3. Diperoleh nilai rata-rata yaitu  $5,528585$ . Ketika transparansi pemerintah daerah meningkat, maka sangat beragamnya variasi. Beberapa pemerintah daerah telah berhasil memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan dan non-keuangan. Tetapi, terdapat beberapa pemerintah daerah yang masih kurang optimal dalam menyediakan transparansi pada laporan keuangan dan non-keuangan. Terlihat bahwa pemerintah daerah mendapat skor 0 untuk nilai terendah seperti pada pemerintah Kabupaten Toba, Kabupaten Lahat, dan lain sebagainya, serta skor 13,5 untuk nilai tertinggi seperti pada pemerintah Kota Sawahlunto dan Provinsi Sumatera Selatan. Dari data diatas tingkat distribusi Transparansi Pelaporan Keuangan dapat dilihat dari standar deviasi sebesar  $3,591763$ .



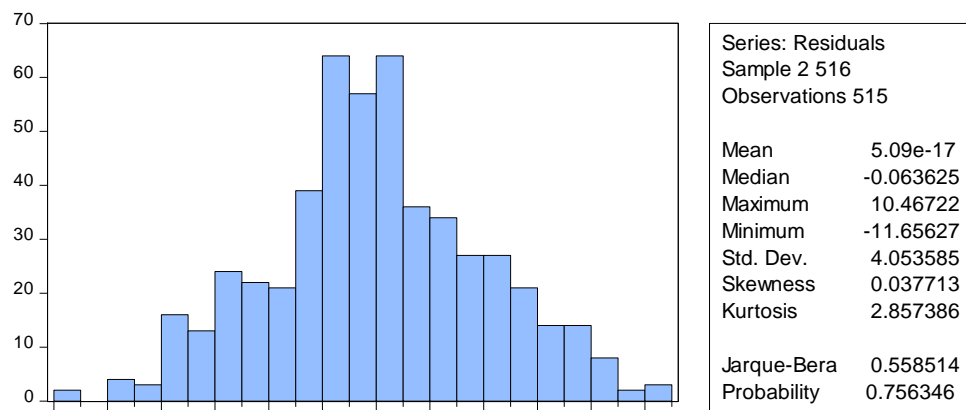
#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas yang harus diuji terlebih dahulu sebelum hipotesis dapat diuji.

##### 1. Uji Normalitas

Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, (2011) berpendapat, Uji Normalitas diukur untuk menganalisis nilai *Jarque-Bera (JB Test)* dengan nilai *Chi Square* tabel. Data dikatakan berdistribusi normal, jika probabilitasnya lebih besar atau sama dengan 0,05. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan hasil sebagai berikut:

Gambar 4. 1  
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Eviews 10, 2023

Pada gambar 4.1 di atas, terlihat hasil *Jarque-Bera* pada penelitian ini yaitu 0,5585514 dengan *Probability* 0,756346. Karena *Probability* bernilai  $0,756346 > 0,05$ , sehingga kesimpulannya adalah data penelitian ini berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, (2011:35), dalam uji Multikolinearitas perlu dilakukan pengujian nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance*. Melihat pada nilai *centered Variance Inflation Factor (VIF)* (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011). Berikut kriteria pengambilan keputusan uji Multikolinearitas, antara lain :

- a. Jika nilai  $VIF < 10$  atau nilai *tolerance*  $> 0,01$ . Artinya, tidak terjadi Multikolinearitas.
- c. Jika nilai  $VIF > 10$  atau nilai *tolerance*  $< 0,01$ . Artinya, terjadi Multikolinearitas.
- d. Jika koefisien korelasi setiap variabel independen  $> 0,8$ , maka terjadi Multikolinearitas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi setiap variabel independen  $< 0,8$ , maka tidak terjadi Multikolinearitas.

Berikut didapat hasil uji multikolinearitas yaitu:

Tabel 4. 3  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors  
Date: 05/14/23 Time: 06:54  
Sample: 1 516  
Included observations: 515

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.032094	1.000015	NA
D(X1)	0.030355	1.026887	1.026874
D(X2)	0.239068	1.012509	1.012509
D(X3)	15.60224	1.015597	1.015595

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3, nilai *centered* VIF setiap variabel bebas yaitu kurang dari 10 yang ditentukan dengan uji multikolinearitas. Dengan kata lain, ditarik kesimpulan bahwa tidak ada multikolinearitas maupun korelasi antara variabel independen dalam model regresi ini.

### 3. Uji Autokorelasi

Menurut Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, (2011), Uji Autokorelasi hanya diperlukan pada data *time series* atau runtut waktu. Sebab dalam penelitian ini menggunakan data *cross section*, maka tidak diperlukan pengujian autokorelasi. Setelah melakukan pengujian autokorelasi, ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4  
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.938906	Prob. F(2,509)	0.3935
Obs*R-squared	2.138791	Prob. Chi-Square(2)	0.3477

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Eviews 10, 2023

Dari tabel 4.4 yang tertera di atas, terlihat bahwa *Prob. Chi-Square* (yang *Obs\*R-Squared*) memiliki nilai  $0,3477 > 0,05$ , sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah autokorelasi yang terjadi. Karena penelitian ini menggunakan data *cross section*, maka tidak diperlukan uji Autokorelasi.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilaksanakan dengan menggunakan uji Glejser, yang berperan dalam meregresi nilai *absolute* dari *residual* variabel bebas. Jika *Prob. Chi-Square* (yang *Obs\*R-Squared*)  $> 0,05$ ,

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat permasalahan Heteroskedastisitas. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari uji Heteroskedastisitas yang dilakukan:

Tabel 4. 5  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.199002	Prob. F(3,511)	0.8971
Obs*R-squared	0.600977	Prob. Chi-Square(3)	0.8962
Scaled explained SS	0.638510	Prob. Chi-Square(3)	0.8876

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Eviews 10, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diatas terlihat nilai *Prob. Chi-Square* (yang *Obs\*R-Squared*) yaitu 0,8962. Diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa angka *Probability* sebesar  $0,8962 > 0,05$ , menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dengan salah satu variabel penelitian.

### 4.2.3 Uji Ketepatan Model

#### 1. Uji F

Menurut Ajija, Sari, Setianto, & Primanti (2011), Uji F disebut juga pengujian seluruh model yang dibutuhkan dalam memeriksa apakah semua koefisien regresi berganda adalah nol atau apakah model tersebut dapat didukung. Menurut Ajija, Sari, Setianto, & Primanti (2011), aturan pengambilan keputusan antara lain:

- a. Jika  $F\text{-stat} > F_{\text{tabel}}$ , dan  $p\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_0$  tidak didukung dan  $H_a$  didukung. Ini berarti, variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen.
- b. Jika  $F\text{-stat} < F_{\text{tabel}}$ , dan  $p\text{-value} > \alpha$ , maka  $H_0$  didukung dan  $H_a$  tidak

didukung. Ini berarti, variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut merupakan hasil dari uji F dapat ditemukan pada tabel 4.6 seperti di bawah ini :

Tabel 4. 6  
Hasil Uji F

F-statistic	3.294234
Prob(F-statistic)	0.020364

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Eviews 10, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, didapat *F-statistic* yaitu 3,294234 > F-tabel yaitu 2,62228, dan *probability* yaitu 0,020364 dengan nilai signifikan 0,05. Hal ini membuktikan bahwa nilai *probability* sebesar 0,020364 < 0,05, dengan demikian ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan rasio pembiayaan utang berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu,  $H_0$  tidak didukung dan  $H_a$  didukung.

$H_0$  : Tidak ada dampak yang signifikan dari ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan rasio pembiayaan utang terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2020.

$H_a$  : Ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan rasio pembiayaan utang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2020.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) berguna untuk mengidentifikasi persentase variabel bebas yang secara kolektif dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi memiliki rentang antara 0 hingga 1. Berikut hasil dari uji  $R^2$ , dapat ditemukan pada tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4. 7  
Hasil Uji  $R^2$

R-squared	0.018973
Adjusted R-squared	0.013214

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Eviews 10, 2023

Dari tabel 4.7 yang telah disajikan, dapat dilihat bahwa dalam uji *Adjusted R-squared*, memiliki nilai koefisien determinasi yaitu 0,013214. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga faktor antara lain, ukuran pemerintah daerah (X1), kualitas laporan keuangan (X2), dan rasio pembiayaan utang (X3) berperan penting dalam mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan (Y) sebesar 1,3214% sedangkan sisanya 98,6786% yang dipengaruhi oleh variabel lain.

#### 4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Selanjutnya setelah pengujian asumsi klasik, tahap berikutnya yaitu menguji regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, persamaan regresi linear berganda guna menyelidiki seberapa jauh kaitan antar variabel independen, antara lain ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan rasio pembiayaan utang, dengan variabel dependen, yakni transparansi pelaporan

keuangan pemerintah daerah. Berikut ini ialah hasil analisis regresi yang dilakukan menggunakan alat analisis program Eviews 10 :

Tabel 4. 8  
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: D(Y)

Method: Least Squares

Date: 05/14/23 Time: 06:38

Sample (adjusted): 2 516

Included observations: 515 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.018381	0.179147	-0.102605	0.9183
D(X1)	0.478776	0.174227	2.747992	0.0062
D(X2)	0.797057	0.488946	1.630153	0.1037
D(X3)	4.317592	3.949967	1.093070	0.2749
R-squared	0.018973	Mean dependent var		-0.020388
Adjusted R-squared	0.013214	S.D. dependent var		4.092596
S.E. of regression	4.065467	Akaike info criterion		5.650671
Sum squared resid	8445.819	Schwarz criterion		5.683635
Log likelihood	-1451.048	Hannan-Quinn criter.		5.663590
F-statistic	3.294234	Durbin-Watson stat		2.957065
Prob(F-statistic)	0.020364			

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Eviews 10, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat hasil regresi, sehingga didapatkan persamaan regresi linear berganda yaitu, sebagai berikut :

$$Y = -0,018381 + 0,478776x_1 + 0,797057x_2 + 4,317592x_3 + e$$

Keterangan :

Y = Transparansi Pelaporan Keuangan

X1 = Ukuran Pemerintah Daerah

X2 = Kualitas Laporan Keuangan

X3 = Rasio Pembiayaan Utang

1. Nilai koefisien  $\alpha$  yang diperoleh yakni -0,018381. Dapat diartikan apabila variabel ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan rasio pembiayaan utang bernilai nol, maka tingkat transparansi pelaporan keuangan akan sebesar nilai konstanta yaitu -0,018381.
2. Nilai koefisien  $\beta_1$  yang diperoleh adalah 0,478776. Dapat diartikan apabila variabel ukuran pemerintah daerah ditingkatkan sebesar 1 satuan dengan asumsi kualitas laporan keuangan dan rasio pembiayaan utang nol, maka ukuran pemerintah daerah akan meningkat sebesar nilai konstanta yaitu 0,478776.
3. Nilai koefisien  $\beta_2$  yang diperoleh adalah 0,797057. Dapat diartikan bila variabel kualitas laporan keuangan ditingkatkan sebesar 1 satuan dengan asumsi ukuran pemerintah daerah dan rasio pembiayaan utang nol, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar nilai konstanta yaitu 0,797057.
4. Nilai koefisien  $\beta_3$  yang diperoleh adalah 4,317592. Dapat diartikan apabila variabel rasio pembiayaan utang ditingkatkan sebesar 1 satuan dengan asumsi ukuran pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan nol, maka rasio pembiayaan utang akan meningkat sebesar nilai konstanta yaitu 4,317592.

#### **4.2.5 Uji Hipotesis (Uji t)**

Menurut Ajija, Sari, Setianto, & Primanti (2011), pengujian t dijalankan dengan perimbangan nilai t-stat dan t-tabel.  $H_0$  tidak didukung dan  $H_1$  didukung, bila sebuah nilai t-stat lebih besar dari nilai t-tabel. Dengan



menggunakan rumus  $n - k$ , dimana  $n$  ialah jumlah sampel, sehingga dapat menghitung derajat kebebasan ( $DF$ ) yang diperlukan untuk menemukan t-tabel. Sebaliknya,  $k$  yakni jumlah variabel independen. Dalam pengujian ini, tingkat kepentingan menggunakan 0,05. Sehingga, nilai t-tabel yang dihasilkan adalah 1,964599.

Dibawah ini adalah hasil dari uji t dapat terlihat pada tabel 4.9 adalah, sebagai berikut :

Tabel 4. 9  
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.018381	0.179147	-0.102605	0.9183
D(X1)	0.478776	0.174227	2.747992	0.0062
D(X2)	0.797057	0.488946	1.630153	0.1037
D(X3)	4.317592	3.949967	1.093070	0.2749
R-squared	0.018973	Mean dependent var		-0.020388
Adjusted R-squared	0.013214	S.D. dependent var		4.092596
S.E. of regression	4.065467	Akaike info criterion		5.650671
Sum squared resid	8445.819	Schwarz criterion		5.683635
Log likelihood	-1451.048	Hannan-Quinn criter.		5.663590
F-statistic	3.294234	Durbin-Watson stat		2.957065
Prob(F-statistic)	0.020364			

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Eviews 10, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, terlihat hasil pengujian t untuk hipotesis yaitu:

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Koefisien regresi dari ukuran pemerintah daerah adalah 0,478776 dan *t-statistic* adalah  $2,747992 > 1,964599$  (t-tabel) dengan nilai *probability*  $0,0062 < 0,05$ , maka H1 didukung. Artinya ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Koefisien regresi dari kualitas laporan keuangan adalah 0,797057 dan *t-statistic* adalah  $1,630153 < 1,964599$  (t-tabel) dengan nilai *probability*  $0,1037 > 0,05$ , maka H2 tidak didukung. Artinya kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Koefisien regresi dari rasio pembiayaan utang adalah sebesar 4,317592 dan *t-statistic* adalah  $1,093070 < 1,964599$  (t-tabel) dengan nilai *probability*  $0,2749 > 0,05$ , maka H3 tidak didukung. Artinya rasio pembiayaan utang tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### 4.3 Pembahasan Hasil Analisis

Tabel 4. 10  
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	T-Statistik	P-value	Ket.
H1	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.	2,747992	0,0062	Didukung
H2	Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.	1,630153	0,1037	Tidak Didukung
H3	Rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.	1,093070	0,2749	Tidak Didukung

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

#### 4.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Nilai *Coefficient* pada variabel ukuran pemerintah daerah yaitu 0,478776 menunjukkan arah positif. Nilai *t-Statistic* sebesar 2,747992 dan *p-value* yaitu 0,0062. Adapun kriteria yang terpenuhi yaitu  $t\text{-Statistic} > 1,96449$  (*t*-tabel) dan  $p\text{-value} < 0,05$ , maka H1 didukung. Temuan penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Temuan ini memperlihatkan bahwa jumlah aset yang dikelola sehubungan dengan desakan transparansi oleh publik. Seiring bertambahnya jumlah aset, pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan transparansi pada pemanfaatan dan pengelolaannya. Dalam pengelolaan yang baik, melimpahnya aset dapat digunakan untuk menciptakan dalam mendorong

layanan publik yang lebih transparan dan berkualitas (Octavia, 2022).

Ukuran pemerintah daerah yang besar menunjukkan bahwa sumber daya yang ada juga sangat banyak, pengawasan dari masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan juga akan jauh lebih ketat karena dikhawatirkan terjadi penyelewengan aset oleh aparatur negara. Laporan keuangan biasanya akan dipublikasikan secara transparan oleh pemerintah melalui website resmi masing-masing pemerintah daerah dengan pengawasan yang ketat. Semakin kompleks pengelolaan keuangan pemerintah daerah besar, semakin banyak asimetri informasi keuangan yang harus dilaporkan kepada publik untuk mengurangi asimetri informasi (Nosihana & Yaya, 2016).

Berdasarkan teori *signaling*, laporan keuangan adalah salah satu bentuk *signal* informasi dari pemerintah kepada *principal* (Wilopo, 2017). Besar kecilnya pemerintah daerah dapat ditentukan dengan melihat berapa banyak aset yang dikelola. Karena, meningkatnya ukuran pemerintah daerah, maka semakin banyak pula aset yang dikelola, dan semakin ketatnya pengontrolan yang dilakukan oleh warga terhadap tindakan pemerintah karena adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan dana. Dengan demikian, semakin efektif kinerja pemerintah daerah, semakin transparan pula penyediaan laporan keuangan pemerintah daerah (Nosihana & Yaya, 2016).

Sejalan dengan penelitian Yudistira & Rohman, (2022); Octavia, (2022); Hasibuan & Muid, (2021) dan Medina, (2012) menerangkan ukuran pemerintah daerah memengaruhi transparansi yang positif signifikan pada pemerintahan daerah Indonesia. Oleh karena itu, jelas bahwa ukuran

pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pengelolaan aset dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya.

Tidak sesuai dengan penelitian Adhiputra, Utama, & Rossitea, (2018) yang membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh antara transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dan ukuran pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Setyaningrum & Syafitri, (2012) yang menjelaskan bahwa persyaratan pengungkapan LKPD di Indonesia tidak dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah berdasarkan total nilai aset. Dalam mengelola pemerintahan daerah, perbedaan gaya kepemimpinan dan kebijakan dapat menjadi penyebab perbedaan ini.

Pada analisis deskriptif sesuai sampel sebanyak 516 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2020. Menghasilkan nilai maksimum sebesar 33,88554 oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan skor 9,5 untuk transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, nilai minimum sebesar 24,63867 oleh Kabupaten Maluku Barat Daya yang mendapatkan skor 1 untuk transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dapat dijelaskan dengan mendapatkan persentase sebesar 53,10%, dengan jumlah 274 dari 516 pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2020, sehingga membuktikan bahwa semakin besarnya total aset dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka semakin meningkat pula transparansi pelaporan pemerintah daerah yang akan diciptakan.

### **4.3.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Nilai *Coefficient* variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,797057 menunjukkan arah positif. Nilai *t-Statistic* adalah 1,630153 dan *p-value* adalah 0,1037. Adapun keputusan yang terpenuhi yaitu  $t\text{-Statistic} < 1,96449$  (t-tabel) dan  $p\text{-value} > 0,05$ , maka H2 tidak didukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, opini audit atas laporan keuangan BPK tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan pemerintah daerah di Indonesia. Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan dalam mendorong pemerintah daerah segera menerbitkan laporan keuangan di situs web supaya lebih transparan. Hal ini terjadi karena ada beberapa pemerintah daerah yang sulit untuk didapatkan laporan keuangannya di situs resmi pemerintah daerah tersebut (Yudistira & Rohman, 2022).

Menurut teori *signal* yang melibatkan masyarakat sebagai *principal*, pemerintah sebagai *agent* diperlukan untuk menunjukkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan penelitian ini, opini audit WTP yang diterima dari BPK RI tidak mendorong pemerintah daerah tersebut untuk mempublikasikan atau menyajikan laporan keuangannya kepada publik secara transparan (Pranaswati & Kiswanto, 2020).

Berdasarkan teori *signal*, laporan keuangan merupakan salah satu sinyal informasi pemerintah kepada *principal*. Oleh sebab itu, pengungkapan laporan

keuangan harus ditingkatkan secara proporsional dengan kinerja pemerintah daerah. Opini terbaik pemerintah daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik Opini Laporan Keuangan, maka seharusnya semakin baik pula transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (Wilopo, 2017).

Opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak berarti bahwa kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah daerah buruk. Sebagai suatu sektor publik, kinerja pemerintah daerah tidak hanya men laporan keuangan saja. Ada beberapa hal menjadi pembeda bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah terhadap opini audit atas LKPD. (Trisnawati & Achmad, 2013).

Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia memiliki nilai yang baik untuk transparansi pelaporan keuangan, tetapi dalam hal kualitas laporan keuangan dengan opini audit atas LKPD masih dikatakan rendah. Oleh karena itu, meskipun pemerintah daerah telah mendapatkan opini yang baik dari BPK tidak diikuti dengan tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Karena belum tentu pemerintah daerah yang mendapat opini audit WTP mempunyai kinerja keuangan yang baik, bahkan dalam menyediakan laporan keuangan pemerintah daerah masih belum tersedia sepenuhnya (Pranaswati & Kiswanto, 2020).

Hal ini sesuai dengan penelitian Yudistira & Rohman, (2022); Pranaswati & Kiswanto, (2020); Wilopo, (2017); Nosihana & Yaya, (2016); dan Trisnawati & Achmad, (2013), menjelaskan bahwa transparansi pelaporan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan. Hal ini terlihat dari opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah, yang tidak menjadi pendorong mereka dalam menyediakan laporan keuangannya secara transparan secara publik.

Berbeda dengan penelitian Octavia, (2022); Hasibuan & Muid, (2021); Adhiputra, Utama, & Rossitea, (2018) yang menunjukkan bahwa opini audit BPK secara signifikan meningkatkan transparansi pemerintah daerah di Indonesia dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, semakin baik standar tersebut diikuti.

Pada analisis deskriptif penelitian ini menghasilkan nilai maksimum 1 untuk opini WTP seperti pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapat skor 5,75 untuk transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, nilai minimum 0 untuk selain opini WTP seperti pemerintah Kabupaten Kupang yang mendapat skor 8,5 untuk transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini juga dijelaskan dengan mendapatkan persentase sebesar 46,71%, dengan jumlah 241 dari 516 pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2020, yang membuktikan bahwa semakin baik kualitas laporan yang dinilai dari opini audit BPK, tidak menunjukkan semakin tingginya transparansi laporan



keuangan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah yang meraih opini WTP tidak menjamin bahwa pemerintah daerah melaporkan atau menyajikan laporan keuangannya secara transparan kepada publik, karena masih ada beberapa pemerintah daerah yang sulit untuk memperoleh laporan keuangannya di situs pemerintah daerah tersebut.

#### **4.3.3 Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Nilai *Coefficient* variabel rasio pembiayaan utang sebesar 4,317592 menunjukkan arah positif. Nilai *t-Statistic* adalah 1,093070 dan *p-value* adalah 0,2749. Adapun keputusan yang terpenuhi yaitu  $t\text{-Statistic} < 1,96449$  (t-tabel) dan  $p\text{-value} > 0,05$ , maka H3 tidak didukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pembiayaan utang tidak mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Studi ini tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara rasio pembiayaan utang dan transparansi pelaporan keuangan, karena pengaruh kreditur sebagai pemilik dana terhadap kegiatan pengelolaan keuangan daerah tidak terlalu besar. Fungsi pengawasan atas kegiatan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan kreditur tidak optimal dan tidak efektif, sehingga pemerintah daerah tidak terlalu khawatir tentang kewajiban mengenai kebutuhan informasi para kreditur (Pranaswati & Kiswanto, 2020).

Berdasarkan teori *signalling*, pemerintah yang bertanggungjawab serta amanah dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat, tanpa menutupi apapun, memberikan pelayanan masyarakat yang baik, serta menunjukkan

kinerja pemerintah daerah yang akuntabilitas kepada publik (Hilmi & Martani, 2012).

Menurut teori *signal*, penelitian ini menunjukkan dengan adanya hutang yang dimiliki pemerintah tidak mendorong dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah yang dikelola termasuk transparansi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Rasio pembiayaan utang akan menyebabkan penilaian kinerjanya menjadi buruk dimata publik dan pihak *stakeholder* lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan lebih tertutup dalam mengungkapkan laporan keuangannya yang menggambarkan kinerja pemerintah tersebut (Pranaswati & Kiswanto, 2020).

Hal ini sejalan dengan Pranaswati & Kiswanto, (2020); Wilopo, (2017); Waliyyani & Mahmud, (2015) menunjukkan rasio pembiayaan hutang tidak ada kaitannya dengan transparansi informasi keuangan melalui situs web pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari kenyataannya adanya beban hutang di Indonesia yang tinggi. Di sisi lain, mengurangi jumlah transparansi informasi keuangan pada website.

Berbeda dengan Rahman, Sutaryo, & Budiatmanto, (2013) dan Medina, (2012) menemukan bahwa rasio pembiayaan utang memiliki pengaruh negatif pada pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Dengan memanfaatkan jaringan internet, informasi terkait keuangan dan non keuangan yang diperlukan pelanggan dapat diakses sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi pemerintah daerah. Hal ini membantu dalam memperkuat peran pemerintah daerah serta memfokuskan perhatian publik dalam upaya

peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Berbeda juga dengan penelitian Trisnawati & Achmad, (2013) menunjukkan rasio pembiayaan utang (*leverage*) memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan pemerintah daerah di internet. Semakin besar *leverage*, maka semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah daerah dalam menyajikan informasi keuangan masing-masing pemerintah daerah.

Pada analisis deskriptif penelitian ini, menghasilkan nilai minimum yaitu -0,062921 dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Subang dengan skor 10,5 untuk transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, nilai maksimum ialah 0,306975 oleh pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang mendapat skor 1 untuk transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dibuktikan dengan mendapatkan persentase sebesar 14,34 %, dengan jumlah 74 dari 516 pemerintah daerah Indonesia tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna memiliki keterbatasan akses terhadap data keuangan pada website pemerintah daerah dengan rasio pembiayaan yang lebih tinggi. Disebabkan oleh peningkatan penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan yang dapat memberikan sinyal dan dapat mengindikasikan buruknya kinerja pemerintah daerah. Akibatnya, akses pengguna terhadap informasi cenderung dibatasi oleh pemerintah daerah dengan rasio pembiayaan yang lebih tinggi. Kurangnya transparansi pemerintah daerah dalam menyajikan informasi yang mereka miliki adalah akibat dari pembatasan ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi dampak ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan rasio pembiayaan utang terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan dapat diakses di website resmi pemerintah daerah. Sehingga diperoleh kesimpulan berikut diambil dari temuan analisis :

1. Hasil uji hipotesis pertama, nilai koefisien yaitu 0,478776 dan *p-value* yaitu 0,0062 menjelaskan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan semakin besar pemerintah daerah diukur dari aset, dengan demikian dapat mempengaruhi peningkatan transparansi pemerintah daerah jika dikelola dengan baik.
2. Hasil uji hipotesis kedua, nilai koefisien yaitu 0,797057 dan *p-value* yaitu 0,1037 menjelaskan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima pemerintah daerah tidak bisa memberikan jaminan dalam mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangan kepada publik. Karena belum tentu pemerintah daerah yang mendapat opini audit WTP tersebut

mempunyai kinerja keuangan yang baik dan bahkan dalam mempublikasikan laporan keuangannya saja masih sulit. Serta masih ada beberapa yang harus login terlebih dahulu, saat ingin membuka dan masuk kedalam situs resmi pemerintah daerah untuk melihat laporan keuangan dan non keuangannya.

3. Hasil uji hipotesis ketiga, nilai koefisien yaitu 4,317592 dan *p-value* yaitu 0,2749 menjelaskan bahwa rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan rasio pembiayaan utang akan berdampak buruk terhadap evaluasi kinerja dari sudut pandang masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebab pemerintah daerah akan lebih tertutup dalam laporan keuangannya yang menggambarkan kinerja pemerintah.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berikut ini adalah keterbatasan penelitian, meliputi :

1. Beberapa situs resmi pemerintah daerah tidak dapat diakses, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi keuangan dan lainnya.
2. Keterbatasan variabel bebas dalam penelitian ini, memungkinkan adanya faktor lain yang dapat dimasukkan sebagai variabel bebas.
3. Data dalam penelitian ini bersifat ordinal yang menyebabkan data terkonsentrasi pada satu bilangan saja, dengan demikian data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan beberapa tahun pengamatan untuk melihat bagaimana pengaruhnya untuk beberapa tahun.

### 5.3 Saran

Sesuai dengan keterbatasan dalam penelitian yang sudah diterangkan, peneliti memberi saran sebagai pertimbangan yaitu, meliputi :

#### 1. Untuk Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan transparansi pemerintah daerah dengan menyediakan dan mempermudah akses untuk memperoleh informasi keuangan di website.

#### 2. Untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Diantisipasi bahwa variabel tambahan mengenai transparansi pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah akan ditemukan melalui penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk juga meneliti pemerintah SKPD selain pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiputra, I. M., Utama, S., & Rossitea, H. (2018). Transparency of Local Government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123-138, 2443-4175.
- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK RI. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021*.
- Chairani, A., Tertiaro, W., & Rela, S. (2021, Januari). Factors Affecting Disclosure Of Financial Statement On Local Government Websites In Indonesia. *Eurasia: Economics & Business*, 1(43).
- Christina. (2016, September). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Hutang, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, 2(1), 1-15.
- Debreceeny, R., Gray, G. L., & Rahman, A. (2002). The Determinants of Internet Financial Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 2, 371-394.
- DJPB Kementerian Keuangan. (2020). *Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020*.
- Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbil, M. (2020). *Panduan Praktis Ekonometrika Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10*. Banten: CV.AA.Rizky.
- Hasibuan, R. N., & Muid, D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pemerintah (Wilayah Provinsi di Pulau Jawa). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1-7. From <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 213-237.
- Khasanah, I. N., Yuhertiana, I., & Budi, G. S. (2017). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Pemerintah Ibu Kota Provinsi Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, pp. 1-20. From <https://akuntansia.com/jurnal-akuntansi-sna/sna-20/>
- Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and Financial Transparency of Local Governments in Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research*, 28(4), 681-699, 2094-372X.

- Kusumawardani, A. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Dalam Website Perusahaan. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Medina, F. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi Sarjana (Online)*. Retrieved Oktober 3, 2022 from <http://lontar.ui.ac.id>
- Moehardiono, I. A., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Internet Financial Reporting Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12(3).
- Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)*, 3(2), 89-104. From <http://jurnal.unayah.ac.id/JDAB/index>
- Octavia, M. F. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia di Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi). *Tesis*.
- Pranaswati, H. V., & Kiswanto. (2020, Desember). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3).
- Rahman, A., Sutaryo, & Budiartanto, A. (2013). Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September 2013*, 1299-1323. Retrieved Maret 11, 2023 from <https://sutaryofe.staff.uns.ac.id>
- Rahmawati, R. A., & Mahmud, A. (2016, Mei). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal (AAJ)*, 5(2), 122-130. From <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Ratmono, D. (2013, September). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet : Pengaruh Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi (MIA)*, 1(2), 28-48.



- Ratmono, I. W. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1-12. From <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Salle, A. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1(1). From <https://doi.org/10.31957/keuda.v1i1.740>
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.
- Siyoto, S., Kes, M., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantoro, & Pasolo, R. M. (2019). The Factors of Financial Report Transparency in the Regional Government. *Journal of Contemporary Accounting*, 1, 11-25.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2013). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet.
- Wahyuni, T. (2022). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Corporate Governance, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Skripsi*, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
- Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal (AAJ)*, 4(2). From <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Wilopo, I. A. (2017, Juni). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *Jurnal Ekonomi Syariah*, VII(1), 61-78.

Yudistira, & Rohman, A. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD di Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan 2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1-10. From <http://journal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Zimmerman, J. L. (1977). The Municipal Accounting Maze : An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, 15, 107-144.

# LAMPIRAN



## Lampiran 2 : Kriteria Sampel Penelitian

Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2020	542
Dikurangi :	
Website Pemerintah Daerah tidak bisa diakses	(20)
Tidak tersedianya data berupa Neraca pada Laporan Keuangan yang dipublikasikan DJPK Kementerian Keuangan	(1)
Tidak tersedianya data statistik lengkap variabel berupa kewajiban dan asset	(4)
Belum mendapatkan opini atas LKPD dari BPK RI	(1)
<b>Jumlah Sampel</b>	<b>516</b>

**Lampiran 3 : Daftar Pengungkapan Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah Tahun 2020**

**a. Kategori Informasi yang Tercantum**

No.	Nama Daerah	Informasi yang Tercantum								
		Neraca	LRA	LAK	Sistem Pencatatan	Rencana Strategis	CaLK	Data Tahun Lalu	Laporan SKPD	LAKIP
1	Provinsi Aceh	1	1	1		1	1	0,75		1
2	Kabupaten Aceh Barat	1	1	1				0,75		
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	1	1	1	1		0,75	0,75	1
4	Kabupaten Aceh Besar					1		0,75	0,75	1
5	Kabupaten Aceh Jaya	1	1	1			1	0,75	0,75	1
6	Kabupaten Aceh Selatan	1	1	1		1	1		0,75	1
7	Kabupaten Aceh Singkil	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
8	Kabupaten Aceh Tamiang	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
9	Kabupaten Aceh Tengah	1	1	1		1		0,75		1
10	Kabupaten Aceh Tenggara							0,75	0,75	1
11	Kabupaten Aceh Timur	1	1	1						
12	Kabupaten Aceh Utara	1	1	1				0,75		
13	Kabupaten Bener Meriah	1	1	1		1	1		0,75	1
14	Kabupaten Bireuen	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
15	Kabupaten Gayo Lues	1	1	1			1	0,75	0,75	1
16	Kabupaten Nagan Raya	1	1	1				0,75	0,75	

17	Kabupaten Pidie	1	1	1				0,75	0,75	1
18	Kabupaten Pidie Jaya					1			0,75	1
19	Kabupaten Simeulue	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
20	Kota Banda Aceh	1								
21	Kota Langsa	1	1	1	1	1		0,75	0,75	1
22	Kota Lhokseumawe	1	1	1	1	1		0,75	0,75	1
23	Kota Sabang	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
24	Kota Subulussalam	1	1	1	1			0,75	0,75	1
25	Provinsi Sumatera Utara	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
26	Kabupaten Asahan					1		0,75		
27	Kabupaten Batu Bara	1	1	1	1		1	0,75	0,75	1
28	Kabupaten Dairi									1
29	Kabupaten Deli Serdang	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
30	Kabupaten Humbang Hasundutan					1		0,75	0,75	
31	Kabupaten Karo	1	1	1	1		1	0,75	0,75	
32	Kabupaten Labuhanbatu					1		0,75	0,75	1
33	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1								
34	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
35	Kabupaten Langkat					1		0,75	0,75	1
36	Kabupaten Mandailing Natal									
37	Kabupaten Nias	1	1	1				0,75	0,75	1

38	Kabupaten Nias Barat									
39	Kabupaten Nias Selatan	1	1	1		1		0,75		
40	Kabupaten Nias Utara	1	1	1						
41	Kabupaten Padang Lawas	1	1	1		1		0,75	0,75	1
42	Kabupaten Samosir									
43	Kabupaten Serdang Bedagai									
44	Kabupaten Simalungun	1						0,75	0,75	1
45	Kabupaten Tapanuli Selatan									
46	Kabupaten Tapanuli Tengah									
47	Kabupaten Tapanuli Utara	1	1	1						
48	Kabupaten Toba									
49	Kota Binjai	1	1	1		1	1		0,75	1
50	Kota Gunungsitoli									
51	Kota Medan	1	1			1		0,75	0,75	1
52	Kota Padang Sidempuan	1	1	1			1	0,75	0,75	1
53	Kota Pematang Siantar									
54	Kota Sibolga							0,75	0,75	
55	Kota Tanjung Balai									
56	Kota Tebing Tinggi									
57	Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
58	Kabupaten Agam	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
59	Kabupaten Dharmasraya	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1



60	Kabupaten Kepulauan Mentawai							0,75	0,75	
61	Kabupaten Lima Puluh Kota							0,75	0,75	
62	Kabupaten Padang Pariaman	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
63	Kabupaten Pasaman					1		0,75		1
64	Kabupaten Pasaman Barat	1	1	1			1	0,75	0,75	1
65	Kabupaten Pesisir Selatan					1			0,75	
66	Kabupaten Sijunjung							0,75		
67	Kabupaten Solok									
68	Kabupaten Solok Selatan	1	1	1		1		0,75	0,75	1
69	Kabupaten Tanah Datar	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
70	Kota Bukit Tinggi	1	1	1	1		1	0,75	0,75	1
71	Kota Padang		1		1	1		0,75	0,75	1
72	Kota Pariaman	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
73	Kota Sawahlunto	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
74	Kota Solok	1	1	1	1	1		0,75	0,75	1
75	Provinsi Sumatera Selatan	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
76	Kabupaten Banyuasin							0,75		
77	Kabupaten Empat Lawang									
78	Kabupaten Lahat									
79	Kabupaten Muara Enim	1	1	1			1	0,75	0,75	1
80	Kabupaten Musi Banyuasin								0,75	
81	Kabupaten Musi Rawas	1	1	1	1		1			



99	Kabupaten Rokan Hilir									
100	Kabupaten Rokan Hulu							0,75		
101	Kabupaten Siak									
102	Kota Dumai							0,75		1
103	Kota Pekanbaru									
104	Provinsi Kepulauan Riau	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
105	Kabupaten Bintan	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	
106	Kabupaten Karimun					1		0,75	0,75	1
107	Kabupaten Kepulauan Anambas				1				0,75	1
108	Kabupaten Lingga									
109	Kota Batam								0,75	
110	Kota Tanjung Pinang							0,75	0,75	1
111	Provinsi Jambi	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
112	Kabupaten Batanghari	1	1	1	1		1	0,75	0,75	1
113	Kabupaten Bungo						1	0,75	0,75	1
114	Kabupaten Kerinci								0,75	
115	Kabupaten Merangin						1			1
116	Kabupaten Muaro Jambi									
117	Kabupaten Sarolangun	1	1	1			1	0,75	0,75	1
118	Kabupaten Tanjung Jabung Barat							0,75		
119	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	1	1	1		1	0,75	0,75	
120	Kabupaten Tebo	1	1	1	1	1		0,75	0,75	

121	Kota Jambi	1	1	1		1		0,75	0,75	1
122	Kota Sungai Penuh									
123	Provinsi Bengkulu	1	1	1		1		0,75	0,75	1
124	Kabupaten Bengkulu Selatan					1		0,75	0,75	1
125	Kabupaten Bengkulu Tengah									
126	Kabupaten Bengkulu Utara							0,75	0,75	
127	Kabupaten Kepahiang	1	1	1			1		0,75	1
128	Kabupaten Lebong							0,75	0,75	
129	Kabupaten Mukomuko								0,75	
130	Kabupaten Rejang Lebong	1	1	1	1		1	0,75	0,75	
131	Kabupaten Seluma							0,75	0,75	
132	Kota Bengkulu									
133	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	1
134	Kabupaten Bangka	1	1	1					0,75	
135	Kabupaten Bangka Barat							0,75	0,75	
136	Kabupaten Bangka Selatan					1		0,75	0,75	1
137	Kabupaten Bangka Tengah	1	1	1			1	0,75	0,75	1
138	Kabupaten Belitung							0,75	0,75	
139	Kabupaten Belitung Timur	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
140	Kota Pangkal Pinang					1			0,75	1
141	Provinsi Lampung	1	1	1	1		1	0,75	0,75	1

142	Kabupaten Lampung Tengah	1	1	1	1		1	0,75	0,75	
143	Kabupaten Lampung Utara	1	1	1	1		1	0,75	0,75	1
144	Kabupaten Lampung Selatan							0,75		
145	Kabupaten Lampung Barat			1					0,75	1
146	Kabupaten Lampung Timur								0,75	
147	Kabupaten Mesuji	1	1	1			1	0,75	0,75	
148	Kabupaten Pesawaran									
149	Kabupaten Pesisir Barat									
150	Kabupaten Pringsewu	1	1	1			1	0,75		
151	Kabupaten Tulang Bawang									
152	Kabupaten Tulang Bawang Barat									
153	Kabupaten Tanggamus	1	1	1	1		1	0,75	0,75	
154	Kabupaten Way Kanan	1	1	1					0,75	1
155	Kota Bandar Lampung									
156	Kota Metro									
157	Provinsi Banten	1	1	1			1	0,75	0,75	1
158	Kabupaten Lebak									
159	Kabupaten Pandeglang		1				1		0,75	1
160	Kabupaten Serang								0,75	1
161	Kabupaten Tangerang									
162	Kota Cilegon	1	1	1			1	0,75	0,75	1

163	Kota Serang							0,75	0,75	
164	Kota Tangerang	1	1	1				0,75	0,75	1
165	Kota Tangerang Selatan	1						0,75	0,75	
166	Provinsi Jawa Barat	1	1	1	1		1	0,75	0,75	1
167	Kabupaten Bandung	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
168	Kabupaten Bandung Barat	1	1	1						
169	Kabupaten Bekasi									
170	Kabupaten Bogor	1	1	1				0,75	0,75	1
171	Kabupaten Ciamis	1	1	1			1	0,75	0,75	1
172	Kabupaten Cianjur									
173	Kabupaten Cirebon					1	1		0,75	1
174	Kabupaten Garut	1	1	1			1	0,75	0,75	
175	Kabupaten Indramayu	1	1	1					0,75	
176	Kabupaten Karawang	1	1	1			1	0,75	0,75	
177	Kabupaten Kuningan	1	1	1	1		1	0,75	0,75	
178	Kabupaten Majalengka	1	1	1		1		0,75	0,75	
179	Kabupaten Pangandaran									
180	Kabupaten Purwakarta	1	1					0,75	0,75	1
181	Kabupaten Subang	1	1	1		1		0,75	0,75	1
182	Kabupaten Sukabumi							0,75	0,75	
183	Kabupaten Sumedang				1			0,75	0,75	1
184	Kabupaten Tasikmalaya	1	1		1		1	0,75	0,75	
185	Kota Bandung	1	1	1			1	0,75	0,75	
186	Kota Banjar	1	1	1				0,75	0,75	1

187	Kota Bekasi	1	1	1			1	0,75	0,75	1
188	Kota Bogor							0,75	0,75	
189	Kota Cimahi	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
190	Kota Cirebon							0,75	0,75	
191	Kota Depok	1	1	1	1		1	0,75	0,75	1
192	Kota Sukabumi								0,75	1
193	Kota Tasikmalaya									
194	Provinsi Jawa Tengah	1	1	1			1	0,75	0,75	
195	Kabupaten Banjarnegara	1	1	1	1	1	1	0,75	0,75	
196	Kabupaten Banyumas	1	1	1			1			1
197	Kabupaten Batang	1	1			1	1	0,75	0,75	1
198	Kabupaten Blora					1		0,75	0,75	1
199	Kabupaten Boyolali	1	1	1			1	0,75	0,75	
200	Kabupaten Brebes	1	1				1	0,75	0,75	
201	Kabupaten Cilacap	1	1	1			1	0,75	0,75	1
202	Kabupaten Demak							0,75	0,75	
203	Kabupaten Grobogan	1	1	1			1	0,75	0,75	
204	Kabupaten Jepara						1	0,75	0,75	
205	Kabupaten Karanganyar					1			0,75	1
206	Kabupaten Kebumen	1	1	1			1	0,75		1
207	Kabupaten Kendal							0,75	0,75	
208	Kabupaten Klaten	1	1	1			1	0,75	0,75	
209	Kabupaten Kudus							0,75	0,75	1
210	Kabupaten Magelang	1	1	1			1	0,75	0,75	

211	Kabupaten Pati	1	1	1			1	0,75	0,75	1
212	Kabupaten Pekalongan	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
213	Kabupaten Pemalang					1				
214	Kabupaten Purbalingga	1					1	0,75	0,75	
215	Kabupaten Purworejo	1	1	1				0,75	0,75	1
216	Kabupaten Rembang	1	1	1			1	0,75	0,75	1
217	Kabupaten Semarang									
218	Kabupaten Sragen								0,75	
219	Kabupaten Sukoharjo	1	1	1			1	0,75	0,75	1
220	Kabupaten Tegal	1	1	1		1	1	0,75		1
221	Kabupaten Temanggung	1	1	1			1	0,75	0,75	
222	Kabupaten Wonogiri	1	1	1	1	1		0,75	0,75	
223	Kabupaten Wonosobo	1	1	1			1	0,75	0,75	1
224	Kota Magelang	1	1	1			1	0,75	0,75	1
225	Kota Pekalongan	1	1	1			1	0,75	0,75	
226	Kota Salatiga	1	1	1	1		1			
227	Kota Semarang	1	1	1			1	0,75	0,75	1
228	Kota Surakarta	1	1	1			1	0,75	0,75	
229	Kota Tegal	1	1			1		0,75	0,75	1
230	Provinsi Jawa Timur	1	1	1				0,75	0,75	
231	Kabupaten Bangkalan	1	1	1					0,75	
232	Kabupaten Banyuwangi	1	1	1						
233	Kabupaten Blitar	1	1	1			1	0,75	0,75	
234	Kabupaten Bojonegoro							0,75	0,75	1



235	Kabupaten Bondowoso	1	1	1	1		1		0,75	
236	Kabupaten Gresik								0,75	
237	Kabupaten Jember	1	1	1			1		0,75	1
238	Kabupaten Jombang	1	1	1	1		1		0,75	
239	Kabupaten Kediri	1	1	1			1		0,75	1
240	Kabupaten Lamongan								0,75	
241	Kabupaten Lumajang	1	1	1				0,75	0,75	1
242	Kabupaten Madiun	1	1	1	1		1	0,75	0,75	1
243	Kabupaten Magetan	1	1	1		1	1	0,75		1
244	Kabupaten Malang	1	1	1		1		0,75	0,75	
245	Kabupaten Mojokerto	1	1	1				0,75	0,75	
246	Kabupaten Nganjuk	1	1	1	1		1		0,75	
247	Kabupaten Ngawi	1	1	1	1		1	0,75	0,75	
248	Kabupaten Pacitan	1	1	1			1	0,75	0,75	
249	Kabupaten Pamekasan	1	1	1				0,75		1
250	Kabupaten Pasuruan							0,75		1
251	Kabupaten Ponorogo							0,75	0,75	
252	Kabupaten Probolinggo							0,75		
253	Kabupaten Sampang	1	1	1						
254	Kabupaten Sidoarjo									
255	Kabupaten Situbondo	1	1	1					0,75	
256	Kabupaten Sumenep									
257	Kabupaten Trenggalek							0,75	0,75	
258	Kabupaten Tuban	1	1	1			1	0,75	0,75	

259	Kabupaten Tulungagung	1	1	1	1		1		0,75	
260	Kota Batu	1	1	1			1	0,75	0,75	1
261	Kota Blitar	1	1	1			1	0,75	0,75	1
262	Kota Kediri	1	1	1		1		0,75	0,75	1
263	Kota Madiun	1	1	1					0,75	
264	Kota Malang							0,75	0,75	1
265	Kota Mojokerto	1	1	1				0,75	0,75	
266	Kota Pasuruan	1	1	1				0,75		
267	Kota Probolinggo	1	1	1				0,75		
268	Kota Surabaya									
269	Provinsi DKI Jakarta	1	1	1			1	0,75	0,75	
270	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1	1			1	0,75	0,75	
271	Kabupaten Bantul	1	1	1		1			0,75	
272	Kabupaten Gunungkidul	1	1	1		1	1	0,75	0,75	
273	Kabupaten Kulon Progo	1	1	1				0,75		
274	Kabupaten Sleman	1	1	1		1	1	0,75		1
275	Kota Yogyakarta	1	1	1			1		0,75	
276	Provinsi Bali	1	1	1	1		1		0,75	1
277	Kabupaten Badung	1	1	1	1		1		0,75	1
278	Kabupaten Bangli	1	1	1			1	0,75	0,75	
279	Kabupaten Buleleng								0,75	
280	Kabupaten Gianyar									
281	Kabupaten Jembrana					1		0,75	0,75	

282	Kabupaten Karangasem	1	1	1			1	0,75	0,75	1
283	Kabupaten Klungkung	1	1	1					0,75	
284	Kabupaten Tabanan	1	1	1				0,75	0,75	
285	Kota Denpasar	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
286	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	1	1			1	0,75	0,75	
287	Kabupaten Bima	1	1	1				0,75	0,75	
288	Kabupaten Dompu							0,75	0,75	1
289	Kabupaten Lombok Barat									
290	Kabupaten Lombok Tengah	1	1	1					0,75	1
291	Kabupaten Lombok Timur					1				
292	Kabupaten Lombok Utara	1	1	1				0,75	0,75	
293	Kabupaten Sumbawa	1		1	1		1			1
294	Kabupaten Sumbawa Barat					1	1		0,75	1
295	Kota Bima	1	1	1				0,75		1
296	Kota Mataram	1	1	1			1	0,75	0,75	1
297	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	1	1		1	1	0,75	0,75	
298	Kabupaten Alor									
299	Kabupaten Belu									
300	Kabupaten Ende									
301	Kabupaten Flores Timur									
302	Kabupaten Kupang	1	1	1				0,75	0,75	
303	Kabupaten Lembata					1		0,75	0,75	

304	Kabupaten Malaka	1	1	1				0,75		
305	Kabupaten Manggarai	1	1	1						
306	Kabupaten Manggarai Barat					1		0,75		
307	Kabupaten Manggarai Timur								0,75	1
308	Kabupaten Ngada									
309	Kabupaten Nagekeo									
310	Kabupaten Rote Ndao	1	1	1				0,75	0,75	
311	Kabupaten Sabu Raijua	1	1	1			1	0,75	0,75	
312	Kabupaten Sikka									
313	Kabupaten Sumba Barat Daya									
314	Kabupaten Sumba Tengah									
315	Kabupaten Sumba Timur									
316	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	1	1					0,75	1
317	Kabupaten Timor Tengah Utara									
318	Kota Kupang	1	1	1			1		0,75	1
319	Provinsi Kalimantan Barat	1	1	1		1	1	0,75	0,75	
320	Kabupaten Bengkayang							0,75	0,75	
321	Kabupaten Kapuas Hulu							0,75	0,75	
322	Kabupaten Kayong Utara	1	1	1		1	1	0,75		
323	Kabupaten Ketapang					1				

324	Kabupaten Kubu Raya	1	1	1	1		1	0,75	0,75	1
325	Kabupaten Landak	1	1	1		1	1	0,75		1
326	Kabupaten Melawi	1		1						
327	Kabupaten Mempawah	1		1		1		0,75		1
328	Kabupaten Sambas							0,75	0,75	1
329	Kabupaten Sanggau	1	1	1				0,75		
330	Kabupaten Sekadau	1	1	1			1		0,75	
331	Kabupaten Sintang	1	1	1			1	0,75	0,75	
332	Kota Pontianak								0,75	
333	Kota Singkawang	1	1				1		0,75	
334	Provinsi Kalimantan Selatan	1	1	1		1		0,75	0,75	
335	Kabupaten Banjar							0,75	0,75	1
336	Kabupaten Barito Kuala									
337	Kabupaten Hulu Sungai Selatan							0,75	0,75	
338	Kabupaten Hulu Sungai Tengah									
339	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	1	1	1				0,75	
340	Kabupaten Kotabaru									
341	Kabupaten Tabalong							0,75		1
342	Kabupaten Tanah Bumbu							0,75	0,75	
343	Kabupaten Tanah Laut	1	1	1		1			0,75	
344	Kabupaten Tapin	1	1	1			1		0,75	

345	Kota Banjarbaru	1		1				0,75		
346	Kota Banjarmasin									
347	Provinsi Kalimantan Tengah	1	1	1			1	0,75	0,75	
348	Kabupaten Barito Selatan	1	1	1					0,75	
349	Kabupaten Barito Timur							0,75	0,75	
350	Kabupaten Barito Utara									
351	Kabupaten Gunung Mas							0,75	0,75	
352	Kabupaten Kapuas	1	1	1			1	0,75		
353	Kabupaten Katingan	1	1	1					0,75	
354	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	1			1	0,75	0,75	
355	Kabupaten Kotawaringin Timur							0,75	0,75	1
356	Kabupaten Lamandau	1		1			1	0,75	0,75	
357	Kabupaten Murung Raya							0,75	0,75	
358	Kabupaten Sukamara									
359	Kabupaten Seruyan		1						0,75	
360	Kota Palangka Raya	1	1	1				0,75	0,75	
361	Provinsi Kalimantan Timur	1	1	1			1	0,75		1
362	Kabupaten Berau									
363	Kabupaten Kutai Barat	1	1	1						
364	Kabupaten Kutai Kartanegara									
365	Kabupaten Kutai Timur	1	1	1				0,75		1

366	Kabupaten Mahakam Ulu									
367	Kabupaten Paser	1		1	1		1		0,75	1
368	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	1	1			1	0,75	0,75	1
369	Kota Balikpapan							0,75		1
370	Kota Bontang						1	0,75	0,75	1
371	Kota Samarinda	1	1	1				0,75	0,75	1
372	Provinsi Kalimantan Utara	1	1	1				0,75	0,75	
373	Kabupaten Bulungan									
374	Kabupaten Malinau	1	1	1					0,75	1
375	Kabupaten Nunukan									
376	Kabupaten Tana Tidung					1		0,75	0,75	1
377	Kota Tarakan	1	1				1		0,75	
378	Provinsi Gorontalo	1	1	1			1	0,75	0,75	1
379	Kabupaten Boalemo	1	1	1			1		0,75	1
380	Kabupaten Bone Bolango	1	1	1	1				0,75	1
381	Kabupaten Gorontalo	1	1	1						
382	Kabupaten Gorontalo Utara									
383	Kabupaten Pohuwato									
384	Kota Gorontalo	1	1	1			1		0,75	
385	Provinsi Sulawesi Selatan	1	1	1		1	1	0,75	0,75	1
386	Kabupaten Bantaeng	1	1	1		1	1	0,75		
387	Kabupaten Barru					1	1		0,75	1
388	Kabupaten Bone	1	1	1		1			0,75	1







432	Kabupaten Parigi Moutong									
433	Kabupaten Sigi									
434	Kabupaten Toli-Toli									
435	Kota Palu									1
436	Provinsi Sulawesi Utara	1	1	1	1		1	0,75	0,75	
437	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	1	1					0,75	
438	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
439	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
440	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
441	Kabupaten Kepulauan Sangihe									
442	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
443	Kabupaten Kepulauan Talaud									
444	Kabupaten Minahasa									
445	Kabupaten Minahasa Selatan									
446	Kabupaten Minahasa Tenggara									
447	Kabupaten Minahasa Utara							0,75	0,75	

448	Kota Bitung	1	1	1				0,75	0,75	
449	Kota Kotamobagu									
450	Kota Manado									
451	Kota Tomohon									1
452	Provinsi Sulawesi Barat	1	1	1			1	0,75	0,75	
453	Kabupaten Majene									
454	Kabupaten Mamasa									1
455	Kabupaten Mamuju									
456	Kabupaten Mamuju Tengah								0,75	
457	Kabupaten Pasangkayu							0,75	0,75	
458	Kabupaten Polewali Mandar									
459	Provinsi Maluku	1	1	1			1		0,75	
460	Kabupaten Buru									
461	Kabupaten Buru Selatan									
462	Kabupaten Maluku Barat Daya									
463	Kabupaten Maluku Tengah							0,75		
464	Kabupaten Maluku Tenggara							0,75		
465	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	1	1					0,75	
466	Kabupaten Seram Bagian Timur									
467	Kota Ambon							0,75	0,75	

468	Kota Tual									
469	Provinsi Maluku Utara									
470	Kabupaten Halmahera Barat									
471	Kabupaten Halmahera Tengah									
472	Kabupaten Halmahera Utara									
473	Kabupaten Halmahera Selatan									
474	Kabupaten Halmahera Timur									
475	Kabupaten Kepulauan Sula									
476	Kabupaten Pulau Morotai						0,75			
477	Kota Ternate	1	1	1	1		1	0,75	0,75	
478	Kota Tidore Kepulauan							0,75		
479	Provinsi Papua							0,75	0,75	1
480	Kabupaten Asmat									
481	Kabupaten Biak Numfor							0,75		1
482	Kabupaten Boven Digoel									
483	Kabupaten Deiyai									
484	Kabupaten Dogiyai							0,75		
485	Kabupaten Intan Jaya									
486	Kabupaten Jayapura									1
487	Kabupaten Jayawijaya					1		0,75	0,75	

488	Kabupaten Keerom								
489	Kabupaten Kepulauan Yapen								
490	Kabupaten Mamberamo Raya								
491	Kabupaten Mamberamo Tengah								
492	Kabupaten Mappi								
493	Kabupaten Merauke								
494	Kabupaten Mimika								
495	Kabupaten Nabire						0,75		
496	Kabupaten Nduga								
497	Kabupaten Paniai								
498	Kabupaten Pegunungan Bintang								
499	Kabupaten Puncak								
500	Kabupaten Puncak Jaya								
501	Kabupaten Sarmi								
502	Kabupaten Supiori								
503	Kabupaten Tolikara								
504	Kabupaten Yahukimo								
505	Kota Jayapura								
506	Provinsi Papua Barat								
507	Kabupaten Fakfak								
508	Kabupaten Kaimana								

509	Kabupaten Manokwari							0,75	0,75	
510	Kabupaten Manokwari Selatan							0,75		
511	Kabupaten Raja Ampat									
512	Kabupaten Sorong									
513	Kabupaten Sorong Selatan									
514	Kabupaten Tambrauw									
515	Kabupaten Teluk Wondama									
516	Kota Sorong									

**b. Kategori Format yang Digunakan dan Interaksi dengan Pengguna**

No.	Nama Daerah	Format yang Digunakan						Interaksi dengan Pengguna			
		PDF	.rar	.jpeg	Excel	PPT	Word	Email	Telepon	Forum Diskusi	Halaman Tautan
1	Provinsi Aceh	1	0,75					1	1	1	
2	Kabupaten Aceh Barat	1	0,75					1	1		1
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1						1	1		
4	Kabupaten Aceh Besar	1						1	1	1	
5	Kabupaten Aceh Jaya	1									
6	Kabupaten Aceh Selatan	1									
7	Kabupaten Aceh Singkil	1			0,5		0,5		1	1	
8	Kabupaten Aceh Tamiang	1							1		







54	Kota Sibolga							1			
55	Kota Tanjung Balai							1			
56	Kota Tebing Tinggi							1	1		1
57	Provinsi Sumatera Barat	1						1	1		1
58	Kabupaten Agam	1						1	1		1
59	Kabupaten Dharmasraya	1						1	1		1
60	Kabupaten Kepulauan Mentawai							1		1	
61	Kabupaten Lima Puluh Kota										
62	Kabupaten Padang Pariaman	1									
63	Kabupaten Pasaman	1	0,75					1	1		
64	Kabupaten Pasaman Barat	1								1	
65	Kabupaten Pesisir Selatan										
66	Kabupaten Sijunjung										
67	Kabupaten Solok							1	1		
68	Kabupaten Solok Selatan	1						1	1		1
69	Kabupaten Tanah Datar	1						1	1		1
70	Kota Bukit Tinggi	1	0,75					1	1		1
71	Kota Padang	1						1	1		1
72	Kota Pariaman	1						1	1	1	1
73	Kota Sawahlunto	1						1	1	1	1
74	Kota Solok	1			0,5			1	1	1	1
75	Provinsi Sumatera Selatan	1						1	1	1	1
76	Kabupaten Banyuasin							1	1		





	Barat										
119	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1					1	1	1		
120	Kabupaten Tebo	1							1		
121	Kota Jambi	1						1			1
122	Kota Sungai Penuh						1	1	1		1
123	Provinsi Bengkulu	1					1	1			1
124	Kabupaten Bengkulu Selatan	1					1	1			
125	Kabupaten Bengkulu Tengah						1				
126	Kabupaten Bengkulu Utara						1	1			
127	Kabupaten Kepahiang	1					1				
128	Kabupaten Lebong							1			
129	Kabupaten Mukomuko										
130	Kabupaten Rejang Lebong	1									
131	Kabupaten Seluma										
132	Kota Bengkulu						1	1			
133	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1									
134	Kabupaten Bangka	1					1	1	1		1
135	Kabupaten Bangka Barat	1					1	1	1		1
136	Kabupaten Bangka Selatan	1					1		1		1
137	Kabupaten Bangka Tengah	1					1	1			1
138	Kabupaten Belitung	1					1	1			1
139	Kabupaten Belitung Timur	1					1	1			

140	Kota Pangkal Pinang	1						1		
141	Provinsi Lampung	1					1	1	1	
142	Kabupaten Lampung Tengah	1					1	1	1	1
143	Kabupaten Lampung Utara	1					1	1	1	1
144	Kabupaten Lampung Selatan	1								
145	Kabupaten Lampung Barat	1								1
146	Kabupaten Lampung Timur									
147	Kabupaten Mesuji	1								1
148	Kabupaten Pesawaran						1			
149	Kabupaten Pesisir Barat						1	1		
150	Kabupaten Pringsewu						1	1		
151	Kabupaten Tulang Bawang						1	1		
152	Kabupaten Tulang Bawang Barat						1			
153	Kabupaten Tanggamus	1					1	1		1
154	Kabupaten Way Kanan	1					1	1		
155	Kota Bandar Lampung						1	1		
156	Kota Metro						1	1		
157	Provinsi Banten	1	0,75				1			1
158	Kabupaten Lebak						1	1		
159	Kabupaten Pandeglang	1								1
160	Kabupaten Serang	1					1	1		
161	Kabupaten Tangerang							1	1	1
162	Kota Cilegon	1					1	1		1



187	Kota Bekasi	1						1	1		
188	Kota Bogor	1								1	
189	Kota Cimahi	1						1	1		
190	Kota Cirebon									1	1
191	Kota Depok	1						1	1		
192	Kota Sukabumi	1	0,75								
193	Kota Tasikmalaya							1	1		1
194	Provinsi Jawa Tengah	1						1	1	1	1
195	Kabupaten Banjarnegara	1						1	1		1
196	Kabupaten Banyumas	1								1	1
197	Kabupaten Batang	1						1	1		
198	Kabupaten Blora							1	1		
199	Kabupaten Boyolali	1						1	1		1
200	Kabupaten Brebes							1	1		1
201	Kabupaten Cilacap	1									1
202	Kabupaten Demak										1
203	Kabupaten Grobogan	1	0,75								1
204	Kabupaten Jepara		0,75					1	1	1	1
205	Kabupaten Karanganyar	1									
206	Kabupaten Kebumen	1	0,75					1	1		
207	Kabupaten Kendal							1	1		1
208	Kabupaten Klaten	1							1	1	
209	Kabupaten Kudus	1	0,75					1	1	1	1
210	Kabupaten Magelang	1						1	1		1

211	Kabupaten Pati		0,75		0,5		0,5	1	1	1	
212	Kabupaten Pekalongan	1	0,75					1	1		
213	Kabupaten Pemalang							1	1		1
214	Kabupaten Purbalingga	1						1	1	1	
215	Kabupaten Purworejo	1									
216	Kabupaten Rembang	1						1	1	1	
217	Kabupaten Semarang							1	1		
218	Kabupaten Sragen							1	1		
219	Kabupaten Sukoharjo	1						1	1	1	1
220	Kabupaten Tegal	1						1	1		
221	Kabupaten Temanggung	1						1	1		1
222	Kabupaten Wonogiri	1						1	1		
223	Kabupaten Wonosobo	1						1	1	1	1
224	Kota Magelang	1						1	1		1
225	Kota Pekalongan	1						1	1		1
226	Kota Salatiga	1						1	1	1	
227	Kota Semarang	1									1
228	Kota Surakarta	1						1	1		1
229	Kota Tegal	1						1	1		
230	Provinsi Jawa Timur	1						1	1		1
231	Kabupaten Bangkalan						0,5	1	1		
232	Kabupaten Banyuwangi	1						1	1	1	
233	Kabupaten Blitar								1		1
234	Kabupaten Bojonegoro							1	1		1



235	Kabupaten Bondowoso	1							1	1
236	Kabupaten Gresik							1		
237	Kabupaten Jember	1					1			1
238	Kabupaten Jombang	1					1	1	1	1
239	Kabupaten Kediri	1						1		
240	Kabupaten Lamongan						1	1		
241	Kabupaten Lumajang	1						1		
242	Kabupaten Madiun	1					1	1		
243	Kabupaten Magetan	1								1
244	Kabupaten Malang	1								
245	Kabupaten Mojokerto	1					1	1		
246	Kabupaten Nganjuk	1					1	1		
247	Kabupaten Ngawi	1						1		
248	Kabupaten Pacitan	1					1	1		
249	Kabupaten Pamekasan	1					1	1		
250	Kabupaten Pasuruan	1					1	1		
251	Kabupaten Ponorogo	1					1	1		
252	Kabupaten Probolinggo	1					1	1		
253	Kabupaten Sampang	1								
254	Kabupaten Sidoarjo									
255	Kabupaten Situbondo	1					1	1		
256	Kabupaten Sumenep						1	1		
257	Kabupaten Trenggalek	1	0,75					1		
258	Kabupaten Tuban	1					1	1		

259	Kabupaten Tulungagung	1									
260	Kota Batu	1					1	1			1
261	Kota Blitar	1									
262	Kota Kediri	1						1			
263	Kota Madiun	1					1	1			1
264	Kota Malang	1									
265	Kota Mojokerto	1					1	1			
266	Kota Pasuruan	1									
267	Kota Probolinggo	1					1	1			
268	Kota Surabaya							1			
269	Provinsi DKI Jakarta	1					1	1			1
270	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1					1	1			1
271	Kabupaten Bantul	1					1	1			
272	Kabupaten Gunungkidul	1	0,75								
273	Kabupaten Kulon Progo						1	1	1		
274	Kabupaten Sleman	1					1	1			
275	Kota Yogyakarta	1						1			1
276	Provinsi Bali	1					1	1	1		1
277	Kabupaten Badung	1					1	1			
278	Kabupaten Bangli	1					1	1			
279	Kabupaten Buleleng	1					1	1			1
280	Kabupaten Gianyar						1	1			1
281	Kabupaten Jembrana	1	0,75				1	1			

282	Kabupaten Karangasem	1					1	1		1
283	Kabupaten Klungkung	1					1	1		
284	Kabupaten Tabanan	1								
285	Kota Denpasar	1					1	1		
286	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1					1	1		
287	Kabupaten Bima	1								
288	Kabupaten Dompu	1					1	1		
289	Kabupaten Lombok Barat									
290	Kabupaten Lombok Tengah	1					1	1		
291	Kabupaten Lombok Timur	1					1	1		
292	Kabupaten Lombok Utara	1								
293	Kabupaten Sumbawa	1					1	1		
294	Kabupaten Sumbawa Barat	1					1	1		
295	Kota Bima	1					1			1
296	Kota Mataram	1						1		1
297	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1					1	1		
298	Kabupaten Alor									1
299	Kabupaten Belu							1		
300	Kabupaten Ende						1			
301	Kabupaten Flores Timur									1
302	Kabupaten Kupang	1					1	1	1	
303	Kabupaten Lembata					0,5				

304	Kabupaten Malaka	1					1	1		
305	Kabupaten Manggarai	1					1		1	
306	Kabupaten Manggarai Barat	1					1	1		
307	Kabupaten Manggarai Timur	1								
308	Kabupaten Ngada									1
309	Kabupaten Nagekeo									1
310	Kabupaten Rote Ndao	1								
311	Kabupaten Sabu Raijua	1	0,75							
312	Kabupaten Sikka						1	1	1	
313	Kabupaten Sumba Barat Daya								1	
314	Kabupaten Sumba Tengah						1			
315	Kabupaten Sumba Timur						1			
316	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1								1
317	Kabupaten Timor Tengah Utara									
318	Kota Kupang	1								
319	Provinsi Kalimantan Barat	1					1	1		1
320	Kabupaten Bengkayang	1					1			
321	Kabupaten Kapuas Hulu	1								
322	Kabupaten Kayong Utara	1								
323	Kabupaten Ketapang	1					1	1		
324	Kabupaten Kubu Raya	1					1			1
325	Kabupaten Landak	1	0,75				1	1		

326	Kabupaten Melawi	1						1	1		
327	Kabupaten Mempawah	1						1	1		
328	Kabupaten Sambas	1									
329	Kabupaten Sanggau	1						1			
330	Kabupaten Sekadau	1						1			
331	Kabupaten Sintang	1									
332	Kota Pontianak							1	1		
333	Kota Singkawang										
334	Provinsi Kalimantan Selatan	1									1
335	Kabupaten Banjar	1						1	1		
336	Kabupaten Barito Kuala							1	1		
337	Kabupaten Hulu Sungai Selatan										
338	Kabupaten Hulu Sungai Tengah							1	1		
339	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1									
340	Kabupaten Kotabaru										1
341	Kabupaten Tabalong	1						1	1		
342	Kabupaten Tanah Bumbu	1								1	1
343	Kabupaten Tanah Laut	1						1	1		1
344	Kabupaten Tapin	1						1	1		
345	Kota Banjarbaru	1						1			1
346	Kota Banjarmasin									1	
347	Provinsi Kalimantan Tengah	1						1	1		1

348	Kabupaten Barito Selatan	1					1	1	1	
349	Kabupaten Barito Timur	1					1	1		
350	Kabupaten Barito Utara								1	
351	Kabupaten Gunung Mas	1					1			1
352	Kabupaten Kapuas	1	0,75				1	1		
353	Kabupaten Katingan	1					1	1		
354	Kabupaten Kotawaringin Barat	1					1	1		
355	Kabupaten Kotawaringin Timur	1					1	1		1
356	Kabupaten Lamandau	1	0,75				1	1		1
357	Kabupaten Murung Raya						1	1		
358	Kabupaten Sukamara						1	1		
359	Kabupaten Seruyan									
360	Kota Palangka Raya	1					1			
361	Provinsi Kalimantan Timur	1					1	1		
362	Kabupaten Berau						1			
363	Kabupaten Kutai Barat	1					1	1		
364	Kabupaten Kutai Kartanegara						1	1		
365	Kabupaten Kutai Timur	1								
366	Kabupaten Mahakam Ulu						1			
367	Kabupaten Paser	1					1	1		
368	Kabupaten Penajam Paser Utara	1								
369	Kota Balikpapan						1	1	1	1

370	Kota Bontang	1								
371	Kota Samarinda	1					1	1		1
372	Provinsi Kalimantan Utara	1	0,75							1
373	Kabupaten Bulungan									1
374	Kabupaten Malinau	1					1			
375	Kabupaten Nunukan						1	1		
376	Kabupaten Tana Tidung	1					1	1		
377	Kota Tarakan	1	0,75				1	1		
378	Provinsi Gorontalo	1								
379	Kabupaten Boalemo	1					1	1		
380	Kabupaten Bone Bolango	1					1			
381	Kabupaten Gorontalo	1								
382	Kabupaten Gorontalo Utara									1
383	Kabupaten Pohuwato						1	1		
384	Kota Gorontalo	1								
385	Provinsi Sulawesi Selatan	1								
386	Kabupaten Bantaeng	1								
387	Kabupaten Barru									
388	Kabupaten Bone	1								
389	Kabupaten Bulukumba	1					1	1		1
390	Kabupaten Enrekang	1					1	1		
391	Kabupaten Jeneponto						1	1		
392	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	0,75				1			1

393	Kabupaten Luwu	1					1	1		
394	Kabupaten Luwu Timur	1					1	1		
395	Kabupaten Luwu Utara	1								
396	Kabupaten Maros	1					1	1		1
397	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	1					1	1		
398	Kabupaten Pinrang	1								
399	Kabupaten Sidenreng Rappang	1						1		
400	Kabupaten Sinjai	1				0,5	1			
401	Kabupaten Soppeng	1					1	1		
402	Kabupaten Takalar								1	1
403	Kabupaten Tana Toraja						1	1		1
404	Kabupaten Wajo	1								
405	Kota Makassar	1					1	1		
406	Kota Palopo	1					1	1		
407	Kota Parepare	1								1
408	Provinsi Sulawesi Tenggara	1					1			
409	Kabupaten Bombana						1	1		
410	Kabupaten Buton Selatan						1			
411	Kabupaten Buton Tengah						1		1	
412	Kabupaten Buton Utara							1		
413	Kabupaten Kolaka									1
414	Kabupaten Kolaka Timur						1	1	1	



415	Kabupaten Kolaka Utara	1								
416	Kabupaten Konawe						1	1		1
417	Kabupaten Konawe Kepulauan						1	1		
418	Kabupaten Konawe Selatan						1	1		1
419	Kabupaten Konawe Utara							1		
420	Kabupaten Muna Barat						1			
421	Kabupaten Wakatobi						1			
422	Kota Bau-Bau						1			1
423	Kota Kendari	1					1	1		
424	Provinsi Sulawesi Tengah	1					1	1	1	
425	Kabupaten Banggai						1	1		
426	Kabupaten Banggai Kepulauan						1	1		
427	Kabupaten Banggai Laut									1
428	Kabupaten Buol	1								
429	Kabupaten Donggala	1					1	1	1	
430	Kabupaten Morowali						1			
431	Kabupaten Morowali Utara						1	1		
432	Kabupaten Parigi Moutong						1			
433	Kabupaten Sigi						1			
434	Kabupaten Toli-Toli									
435	Kota Palu	1						1		
436	Provinsi Sulawesi Utara	1					1	1		

437	Kabupaten Bolaang Mongondow	1						1	1		
438	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan							1			
439	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur							1			
440	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara							1			
441	Kabupaten Kepulauan Sangihe							1			
442	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro							1			
443	Kabupaten Kepulauan Talaud							1			
444	Kabupaten Minahasa							1	1		
445	Kabupaten Minahasa Selatan							1			
446	Kabupaten Minahasa Tenggara										
447	Kabupaten Minahasa Utara										
448	Kota Bitung	1									
449	Kota Kotamobagu										1
450	Kota Manado							1	1		
451	Kota Tomohon	1									
452	Provinsi Sulawesi Barat	1									
453	Kabupaten Majene							1			
454	Kabupaten Mamasa	1						1	1		1

455	Kabupaten Mamuju									
456	Kabupaten Mamuju Tengah						1	1		
457	Kabupaten Pasangkayu						1			1
458	Kabupaten Polewali Mandar									
459	Provinsi Maluku	1					1	1		1
460	Kabupaten Buru						1			
461	Kabupaten Buru Selatan									1
462	Kabupaten Maluku Barat Daya									1
463	Kabupaten Maluku Tengah						1			1
464	Kabupaten Maluku Tenggara						1	1		
465	Kabupaten Seram Bagian Barat	1					1		1	
466	Kabupaten Seram Bagian Timur						1	1	1	
467	Kota Ambon						1	1		
468	Kota Tual						1	1		
469	Provinsi Maluku Utara						1			1
470	Kabupaten Halmahera Barat							1		
471	Kabupaten Halmahera Tengah						1		1	
472	Kabupaten Halmahera Utara						1	1	1	
473	Kabupaten Halmahera Selatan						1	1		
474	Kabupaten Halmahera Timur						1	1		

475	Kabupaten Kepulauan Sula										1
476	Kabupaten Pulau Morotai						1	1			1
477	Kota Ternate	1					1	1			
478	Kota Tidore Kepulauan										
479	Provinsi Papua	1					1	1			
480	Kabupaten Asmat						1	1			
481	Kabupaten Biak Numfor	1					1				1
482	Kabupaten Boven Digoel						1	1	1		
483	Kabupaten Deiyai						1	1			1
484	Kabupaten Dogiyai						1	1			
485	Kabupaten Intan Jaya						1				
486	Kabupaten Jayapura	1									
487	Kabupaten Jayawijaya	1					1	1			
488	Kabupaten Keerom										
489	Kabupaten Kepulauan Yapen										
490	Kabupaten Mamberamo Raya										
491	Kabupaten Mamberamo Tengah						1	1			1
492	Kabupaten Mappi										1
493	Kabupaten Merauke						1				
494	Kabupaten Mimika						1	1	1		
495	Kabupaten Nabire										
496	Kabupaten Nduga								1		
497	Kabupaten Paniai						1	1			

498	Kabupaten Pegunungan Bintang										
499	Kabupaten Puncak						1	1	1		
500	Kabupaten Puncak Jaya							1			
501	Kabupaten Sarmi						1	1			
502	Kabupaten Supiori										1
503	Kabupaten Tolikara						1	1			
504	Kabupaten Yahukimo							1			
505	Kota Jayapura						1				
506	Provinsi Papua Barat						1	1			
507	Kabupaten Fakfak						1	1			
508	Kabupaten Kaimana						1	1			1
509	Kabupaten Manokwari										
510	Kabupaten Manokwari Selatan						1				
511	Kabupaten Raja Ampat						1	1			
512	Kabupaten Sorong						1	1			
513	Kabupaten Sorong Selatan							1			1
514	Kabupaten Tambrau						1	1			
515	Kabupaten Teluk Wondama						1	1			
516	Kota Sorong						1				

**Lampiran 4 : Daftar Pemerintah Daerah dan Hasil Pengumpulan Data**

<b>NO</b>	<b>Nama Daerah</b>	<b>Ukuran Pemerintah Daerah (X1)</b>	<b>Kualitas Laporan Keuangan (X2)</b>	<b>Rasio Pembiayaan Utang (X3)</b>	<b>Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)</b>
1	Provinsi Aceh	31,0419654	1	0,100267523	11,5
2	Kabupaten Aceh Barat	28,8533926	1	0,015220105	8,5
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	28,3281273	1	0,008631657	10,5
4	Kabupaten Aceh Besar	30,3781847	1	0,000541902	7,5
5	Kabupaten Aceh Jaya	28,5001580	1	0,001569116	7,5
6	Kabupaten Aceh Selatan	28,6149558	1	0,008689042	7,75
7	Kabupaten Aceh Singkil	28,0353753	1	0,005143292	12,5
8	Kabupaten Aceh Tamiang	28,5793043	1	0,010864337	10,5
9	Kabupaten Aceh Tengah	28,6027423	1	0,014169456	7,75
10	Kabupaten Aceh Tenggara	28,8239541	1	0,004728277	6,5
11	Kabupaten Aceh Timur	28,8240790	1	0,035024768	5
12	Kabupaten Aceh Utara	29,1773467	1	0,011108988	5,75
13	Kabupaten Bener Meriah	28,1269117	1	0,003791178	10,25
14	Kabupaten Bireuen	28,8157719	1	0,020212302	11,5
15	Kabupaten Gayo Lues	28,3598339	1	0,011257730	8,5
16	Kabupaten Nagan Raya	28,3833008	1	0,021652981	10,25
17	Kabupaten Pidie	28,9444716	1	0,010634002	7,5

18	Kabupaten Pidie Jaya	28,2067835	1	0,000477944	5,75
19	Kabupaten Simeulue	28,1486974	1	0,003595074	10,25
20	Kota Banda Aceh	29,2716595	1	0,029972352	5
21	Kota Langsa	28,2761646	1	0,009385985	11,5
22	Kota Lhokseumawe	28,2989436	1	0,023024869	10,5
23	Kota Sabang	28,0246641	1	0,003476122	10,5
24	Kota Subulussalam	28,0304857	1	0,024803322	8,5
25	Provinsi Sumatera Utara	30,5042745	1	0,088388333	12,5
26	Kabupaten Asahan	28,8907009	1	0,002217157	4,75
27	Kabupaten Batu Bara	28,4049650	1	0,037783905	10,5
28	Kabupaten Dairi	28,2699591	1	0,005805936	4
29	Kabupaten Deli Serdang	29,6691678	1	0,016314012	9,5
30	Kabupaten Humbang Hasundutan	28,2908950	1	0,007076155	6,5
31	Kabupaten Karo	28,5804583	1	0,005188548	9,5
32	Kabupaten Labuhanbatu	28,6202326	0	0,026509584	9,25
33	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	28,1170257	1	0,014424159	4
34	Kabupaten Labuhanbatu Utara	28,2764950	1	0,003067183	8,5
35	Kabupaten Langkat	29,0308232	1	0,001412672	6,5
36	Kabupaten Mandailing Natal	28,2513947	0	0,000029844	4
37	Kabupaten Nias	28,3024180	0	0,004974564	8,25
38	Kabupaten Nias Barat	27,8704584	0	0,018994013	2
39	Kabupaten Nias Selatan	28,3302064	0	0,037410222	6,75
40	Kabupaten Nias Utara	28,2072438	0	0,006945621	5
41	Kabupaten Padang Lawas	28,2114879	1	0,004817173	8,5

42	Kabupaten Samosir	28,0729942	1	0,004846207	2
43	Kabupaten Serdang Bedagai	28,3427925	1	0,005103745	0
44	Kabupaten Simalungun	28,8643525	0	0,051814360	5,5
45	Kabupaten Tapanuli Selatan	28,5847394	1	0,001106720	1
46	Kabupaten Tapanuli Tengah	28,2079961	1	0,075094700	1
47	Kabupaten Tapanuli Utara	28,5292595	1	0,055662029	8
48	Kabupaten Toba	28,2652977	1	0,003792559	0
49	Kota Binjai	27,9089212	1	0,011302767	7,75
50	Kota Gunungsitoli	27,4802331	1	0,014677897	2
51	Kota Medan	31,1541677	1	0,003117746	6,5
52	Kota Padang Sidempuan	27,9227168	1	0,006880830	8,5
53	Kota Pematang Siantar	28,8443230	0	0,008981242	1
54	Kota Sibolga	28,1311733	1	0,003531626	2,5
55	Kota Tanjung Balai	27,9366725	0	0,001363414	1
56	Kota Tebing Tinggi	28,2226281	1	0,021886391	3
57	Provinsi Sumatera Barat	28,4934541	1	0,115932742	12,5
58	Kabupaten Agam	28,3342346	1	0,016953526	11,5
59	Kabupaten Dharmasraya	28,4991504	1	0,015092020	11,5
60	Kabupaten Kepulauan Mentawai	28,2895219	0	0,000844534	3,5
61	Kabupaten Lima Puluh Kota	28,1873387	1	0,001196394	1,5
62	Kabupaten Padang Pariaman	27,9251367	1	0,008303692	8,5
63	Kabupaten Pasaman	28,2665278	1	0,002672745	6,5
64	Kabupaten Pasaman Barat	28,4921569	1	0,007702767	8,5
65	Kabupaten Pesisir Selatan	28,5267538	1	0,034808614	1,75



66	Kabupaten Sijunjung	27,5985613	1	0,007633085	0,75
67	Kabupaten Solok	28,1028954	1	0,007118496	2
68	Kabupaten Solok Selatan	28,2673326	1	0,007701132	10,5
69	Kabupaten Tanah Datar	27,9002678	1	0,020594457	12,5
70	Kota Bukit Tinggi	28,1566409	1	0,002106170	12,25
71	Kota Padang	26,3702766	1	0,025757475	9,5
72	Kota Pariaman	27,4447201	1	0,009367316	12,5
73	Kota Sawahlunto	27,6091718	1	0,024163282	13,5
74	Kota Solok	28,0772535	1	0,000673802	13
75	Provinsi Sumatera Selatan	31,0966068	1	0,026650914	13,5
76	Kabupaten Banyuasin	29,1412687	1	0,052501231	2,75
77	Kabupaten Empat Lawang	28,4104092	1	0,004879436	1
78	Kabupaten Lahat	28,7895104	1	0,002842601	0
79	Kabupaten Muara Enim	29,4352366	1	0,017372001	10,5
80	Kabupaten Musi Banyuasin	29,7273969	1	0,029591853	2,75
81	Kabupaten Musi Rawas	29,0165543	1	0,005892139	9
82	Kabupaten Musi Rawas Utara	28,4112491	1	0,092806033	3,5
83	Kabupaten Ogan Ilir	28,5364783	1	0,012114118	8,5
84	Kabupaten Ogan Komering Ilir	29,1216316	1	0,006362237	4,75
85	Kabupaten Ogan Komering Ulu	28,7851908	1	0,012584875	5
86	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	28,7081866	1	0,006645093	1
87	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	28,6528670	1	0,031823969	10,5
88	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	28,7208269	0	0,184080609	1
89	Kota Lubuk Linggau	28,7052521	1	0,021649613	9,75

90	Kota Pagar Alam	28,4676863	1	0,005295416	0
91	Kota Palembang	30,5470371	1	0,015320766	2
92	Kota Prabumulih	28,5994718	1	0,009303995	4,75
93	Provinsi Riau	31,1289235	1	0,007089283	12,5
94	Kabupaten Bengkalis	29,3936526	1	0,015494049	7,5
95	Kabupaten Kampar	29,1470614	1	0,007745370	11,5
96	Kabupaten Kepulauan Meranti	28,7086204	1	0,034282818	0
97	Kabupaten Kuantan Singingi	28,6516552	1	0,008897960	8,5
98	Kabupaten Pelalawan	29,0298681	1	0,004034786	1
99	Kabupaten Rokan Hilir	29,3877575	1	0,008941664	0
100	Kabupaten Rokan Hulu	28,8592220	1	0,027036882	0,75
101	Kabupaten Siak	29,4376254	1	0,010226721	2
102	Kota Dumai	28,7315295	1	0,016033441	4,75
103	Kota Pekanbaru	29,6832606	1	0,038774917	1
104	Provinsi Kepulauan Riau	29,5016459	1	0,070764186	11,5
105	Kabupaten Bintan	28,5729307	1	0,005009714	11,5
106	Kabupaten Karimun	28,4316694	1	0,049708247	7,5
107	Kabupaten Kepulauan Anambas	28,3143828	1	0,000790257	5,75
108	Kabupaten Lingga	28,2082900	1	0,003758203	2
109	Kota Batam	29,4952683	1	0,003268667	0,75
110	Kota Tanjung Pinang	28,2155679	1	0,002000761	5,5
111	Provinsi Jambi	29,8347576	1	0,042972496	12,5
112	Kabupaten Batanghari	26,9009925	1	0,237824264	11,5
113	Kabupaten Bungo	28,1934780	0	0,061147354	6,5

114	Kabupaten Kerinci	28,1544968	1	0,007636414	2,75
115	Kabupaten Merangin	28,4511590	1	0,047217357	3
116	Kabupaten Muaro Jambi	28,5235531	1	0,002236034	2
117	Kabupaten Sarolangun	26,5546662	1	0,118027071	10
118	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	29,1013198	1	0,004260116	0,75
119	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	28,3753914	1	0,001883207	10,5
120	Kabupaten Tebo	28,4728460	1	0,000896367	8,5
121	Kota Jambi	29,0138760	1	0,011715668	9,5
122	Kota Sungai Penuh	27,9810737	1	0,001705030	4
123	Provinsi Bengkulu	29,4628625	1	0,066984136	10,5
124	Kabupaten Bengkulu Selatan	27,8951487	0	0,009107876	6,5
125	Kabupaten Bengkulu Tengah	28,0010536	1	0,003736851	1
126	Kabupaten Bengkulu Utara	28,1832122	1	0,009135964	3,5
127	Kabupaten Kepahiang	27,8399373	1	0,020706167	7,75
128	Kabupaten Lebong	28,1471519	1	0,018282169	2,5
129	Kabupaten Mukomuko	28,2010199	1	0,022836872	0,75
130	Kabupaten Rejang Lebong	28,0779052	1	0,022961812	7,5
131	Kabupaten Seluma	28,1630942	1	0,002630962	1,5
132	Kota Bengkulu	28,3203384	1	0,085995982	2
133	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29,1273987	1	0,026608293	9,5
134	Kabupaten Bangka	28,3139492	1	0,013162338	8,75
135	Kabupaten Bangka Barat	27,9666985	1	0,016202087	6,5
136	Kabupaten Bangka Selatan	28,1389237	1	0,019983392	7,5
137	Kabupaten Bangka Tengah	28,0602875	1	0,012340905	10,5

138	Kabupaten Belitung	28,4477953	1	0,007482794	5,5
139	Kabupaten Belitung Timur	28,0749963	1	0,004214676	10,5
140	Kota Pangkal Pinang	28,7634246	1	0,002848712	4,75
141	Provinsi Lampung	30,0497878	1	0,077758952	11,5
142	Kabupaten Lampung Tengah	28,8036823	1	0,014938071	11,5
143	Kabupaten Lampung Utara	28,4696711	0	0,028473612	12,5
144	Kabupaten Lampung Selatan	28,8815581	1	0,012352897	1,75
145	Kabupaten Lampung Barat	28,6000475	1	0,003786298	4,75
146	Kabupaten Lampung Timur	28,4406294	1	0,022297553	0,75
147	Kabupaten Mesuji	28,2956002	1	0,005479643	7,5
148	Kabupaten Pesawaran	28,4610195	1	0,016616312	1
149	Kabupaten Pesisir Barat	28,1145966	1	0,030001492	2
150	Kabupaten Pringsewu	28,3654144	1	0,004941458	6,75
151	Kabupaten Tulang Bawang	28,3022554	1	0,014101228	2
152	Kabupaten Tulang Bawang Barat	28,3266178	1	0,100770651	1
153	Kabupaten Tanggamus	28,4529845	1	0,010653599	10,5
154	Kabupaten Way Kanan	28,5861406	1	0,041129919	7,75
155	Kota Bandar Lampung	29,3239520	0	0,166265254	2
156	Kota Metro	25,6144222	1	0,154724538	2
157	Provinsi Banten	30,5422438	1	0,109268879	10,25
158	Kabupaten Lebak	29,1445421	1	0,005134341	2
159	Kabupaten Pandeglang	27,2860111	1	0,039953079	5,75
160	Kabupaten Serang	28,9803552	1	0,016040088	4,75
161	Kabupaten Tangerang	30,4643758	1	0,001662344	3

162	Kota Cilegon	29,2471807	1	0,005239823	10,5
163	Kota Serang	28,7375740	1	0,005091323	4,5
164	Kota Tangerang	29,8539719	1	0,001000751	10,5
165	Kota Tangerang Selatan	30,7722275	1	0,005017732	3,5
166	Provinsi Jawa Barat	31,2845241	1	0,052324881	11,5
167	Kabupaten Bandung	30,0987967	1	0,007908796	11,5
168	Kabupaten Bandung Barat	28,9068837	0	0,003543513	3
169	Kabupaten Bekasi	30,2407852	1	0,018837092	1
170	Kabupaten Bogor	30,9169828	1	0,004562804	7,5
171	Kabupaten Ciamis	28,9475622	1	0,017432748	9,5
172	Kabupaten Cianjur	29,4882293	1	0,017188339	2
173	Kabupaten Cirebon	27,7297825	1	0,016746025	7,75
174	Kabupaten Garut	28,7362571	1	0,003026337	11,25
175	Kabupaten Indramayu	29,4137231	0	0,014609558	5,75
176	Kabupaten Karawang	29,3402905	1	0,010424192	7,5
177	Kabupaten Kuningan	28,6052687	1	0,015348218	10,5
178	Kabupaten Majalengka	29,2964732	1	0,011311587	10,5
179	Kabupaten Pangandaran	28,5568428	1	0,108508480	2
180	Kabupaten Purwakarta	28,6483334	1	0,035641942	7,5
181	Kabupaten Subang	29,1368205	1	(0,016588903)	10,5
182	Kabupaten Sukabumi	29,1998913	1	0,023905187	3,5
183	Kabupaten Sumedang	28,8404955	1	0,011699250	4,5
184	Kabupaten Tasikmalaya	29,2537475	1	0,008320316	9,5
185	Kota Bandung	31,4106942	1	0,003846787	8,5

186	Kota Banjar	28,1434360	1	0,008537908	7,5
187	Kota Bekasi	30,3042318	1	0,009273295	9,5
188	Kota Bogor	29,8506445	1	0,011534565	3,5
189	Kota Cimahi	28,6463219	1	0,017630935	10,5
190	Kota Cirebon	29,0019098	1	0,010601365	3,5
191	Kota Depok	29,2161605	1	0,005674566	10,5
192	Kota Sukabumi	28,1472537	1	0,014282616	3,5
193	Kota Tasikmalaya	28,9336461	1	0,022173782	3
194	Provinsi Jawa Tengah	31,2479293	1	0,022155098	10,5
195	Kabupaten Banjarnegara	29,1415046	1	0,004760128	11,5
196	Kabupaten Banyumas	29,5090372	1	0,008217316	8
197	Kabupaten Batang	28,6990926	1	0,022420301	9,5
198	Kabupaten Blora	28,8497550	1	0,008218639	5,5
199	Kabupaten Boyolali	29,0726771	1	0,007344092	9,5
200	Kabupaten Brebes	28,9503103	1	0,017667349	7,5
201	Kabupaten Cilacap	29,4306276	1	0,005243728	8,5
202	Kabupaten Demak	29,3709820	1	0,002840614	2,5
203	Kabupaten Grobogan	28,9583673	1	0,026761703	8,25
204	Kabupaten Jepara	29,5221549	1	0,007280783	7,25
205	Kabupaten Karanganyar	29,1176818	1	0,013498478	3,75
206	Kabupaten Kebumen	29,1408018	1	0,009233863	9,5
207	Kabupaten Kendal	28,7723032	1	0,015357035	4,5
208	Kabupaten Klaten	28,9026837	1	0,005852928	8,5
209	Kabupaten Kudus	29,1722865	1	0,008462992	8,25

210	Kabupaten Magelang	28,8634583	1	0,006153136	9,5
211	Kabupaten Pati	29,4643859	1	0,002798618	11,25
212	Kabupaten Pekalongan	28,7514161	1	0,017730473	11,25
213	Kabupaten Pemalang	28,9668118	1	0,012918136	4
214	Kabupaten Purbalingga	28,6498663	1	0,014746705	7,5
215	Kabupaten Purworejo	28,7651479	1	0,009614439	6,5
216	Kabupaten Rembang	28,4839298	1	0,022739335	10,5
217	Kabupaten Semarang	29,2207830	1	0,008025626	2
218	Kabupaten Sragen	29,0389736	1	0,009186409	2,75
219	Kabupaten Sukoharjo	29,3670864	1	0,004882578	11,5
220	Kabupaten Tegal	28,9132155	1	0,010409712	9,75
221	Kabupaten Temanggung	28,7897718	1	0,014665235	9,5
222	Kabupaten Wonogiri	28,9715514	1	0,007689927	9,5
223	Kabupaten Wonosobo	28,8668827	1	0,004424380	11,5
224	Kota Magelang	29,0565993	1	0,000594986	10,5
225	Kota Pekalongan	28,7032612	1	0,006050162	9,5
226	Kota Salatiga	28,7696273	1	0,011247750	9
227	Kota Semarang	30,6757298	1	0,005292991	8,5
228	Kota Surakarta	30,1271917	1	0,006673709	9,5
229	Kota Tegal	28,5052212	1	0,018416592	8,5
230	Provinsi Jawa Timur	31,3670435	1	0,018757025	8,5
231	Kabupaten Bangkalan	28,8092910	1	0,014278758	6,25
232	Kabupaten Banyuwangi	29,1594250	1	0,011898559	7
233	Kabupaten Blitar	29,1282987	1	0,010418988	7,5

234	Kabupaten Bojonegoro	30,2174983	1	0,027879533	5,5
235	Kabupaten Bondowoso	28,6909455	1	0,007714289	8,75
236	Kabupaten Gresik	29,4568407	1	0,004580902	1,75
237	Kabupaten Jember	29,3095872	0	0,022977689	8,75
238	Kabupaten Jombang	28,9842634	1	0,009354712	10,75
239	Kabupaten Kediri	29,2243479	1	0,002159157	7,75
240	Kabupaten Lamongan	29,3201309	1	0,011437838	2,75
241	Kabupaten Lumajang	28,5532122	1	0,034027586	7,5
242	Kabupaten Madiun	29,0716399	1	0,003652857	10,5
243	Kabupaten Magetan	28,4631332	1	0,003920098	8,75
244	Kabupaten Malang	29,5740578	1	0,008604597	6,5
245	Kabupaten Mojokerto	29,4142509	1	0,005784816	7,5
246	Kabupaten Nganjuk	28,8496456	1	0,015668102	8,75
247	Kabupaten Ngawi	28,3135730	1	0,001470559	8,5
248	Kabupaten Pacitan	28,4045843	1	0,002621010	8,5
249	Kabupaten Pamekasan	28,9451864	1	0,033951760	7,75
250	Kabupaten Pasuruan	29,1066559	1	0,008786995	4,75
251	Kabupaten Ponorogo	28,5110699	1	0,035462077	4,5
252	Kabupaten Probolinggo	28,6200374	1	0,023692009	3,75
253	Kabupaten Sampang	28,9970040	1	0,004227118	4
254	Kabupaten Sidoarjo	30,6880460	1	0,004922027	0
255	Kabupaten Situbondo	29,0688932	1	0,004790239	6,75
256	Kabupaten Sumenep	29,7600603	1	0,004306819	2
257	Kabupaten Trenggalek	28,4864126	1	0,011199528	4,25



258	Kabupaten Tuban	29,6189966	1	0,003102290	8,5
259	Kabupaten Tulungagung	29,0164045	1	0,013107428	6,75
260	Kota Batu	28,3078311	1	0,004955674	10,5
261	Kota Blitar	28,5846260	1	0,011397994	7,5
262	Kota Kediri	28,7658853	1	0,006444400	8,5
263	Kota Madiun	28,6420735	1	0,004541171	7,75
264	Kota Malang	29,5025912	1	0,001994785	3,5
265	Kota Mojokerto	28,3258357	1	0,012653671	7,5
266	Kota Pasuruan	28,7590266	1	0,002672262	4,75
267	Kota Probolinggo	28,2164952	1	0,009537411	6,75
268	Kota Surabaya	31,4577114	1	0,014197892	1
269	Provinsi DKI Jakarta	33,8855437	1	0,029033111	9,5
270	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	28,8787750	1	0,011132991	9,5
271	Kabupaten Bantul	28,7958211	1	0,003774527	7,75
272	Kabupaten Gunungkidul	28,4891744	1	0,007093789	8,25
273	Kabupaten Kulon Progo	28,4891744	1	0,007093789	6,75
274	Kabupaten Sleman	29,2523241	1	0,001002364	9,75
275	Kota Yogyakarta	29,1365417	1	0,002055078	7,75
276	Provinsi Bali	29,9838774	1	0,015217030	11,75
277	Kabupaten Badung	30,4954511	1	0,003667264	9,75
278	Kabupaten Bangli	27,8685897	1	0,018382408	8,5
279	Kabupaten Buleleng	28,6537437	1	0,010388571	4,75
280	Kabupaten Gianyar	28,6780343	1	0,151900791	3
281	Kabupaten Jembrana	28,4348471	1	0,004592197	6,25

282	Kabupaten Karangasem	28,0294395	1	0,028611074	10,5
283	Kabupaten Klungkung	27,7590178	1	0,025056848	6,75
284	Kabupaten Tabanan	28,4861651	1	0,023037859	5,5
285	Kota Denpasar	29,4712173	1	0,003976873	10,5
286	Provinsi Nusa Tenggara Barat	30,1844232	1	0,021849335	8,5
287	Kabupaten Bima	28,6261354	1	0,000583294	5,5
288	Kabupaten Dompu	28,1771494	1	0,008735823	5,5
289	Kabupaten Lombok Barat	28,6804979	1	0,050362774	0
290	Kabupaten Lombok Tengah	28,8026877	1	0,026547952	7,75
291	Kabupaten Lombok Timur	28,9366198	1	0,054034481	4
292	Kabupaten Lombok Utara	28,2502158	1	0,011956378	5,5
293	Kabupaten Sumbawa	28,8247852	1	0,007664488	8
294	Kabupaten Sumbawa Barat	28,4243032	1	0,001852442	6,75
295	Kota Bima	28,2846494	1	0,001173689	7,75
296	Kota Mataram	28,8508487	1	0,020499546	9,5
297	Provinsi Nusa Tenggara Timur	30,8816826	1	0,008404656	9,5
298	Kabupaten Alor	28,4880296	1	0,000515981	1
299	Kabupaten Belu	28,1302653	1	0,011351123	1
300	Kabupaten Ende	28,0728512	1	0,009419642	1
301	Kabupaten Flores Timur	27,7902076	0	0,010131176	1
302	Kabupaten Kupang	28,4245673	0	0,006805237	8,5
303	Kabupaten Lembata	28,0146245	1	0,030696156	3
304	Kabupaten Malaka	27,9029393	1	0,011135775	6,75
305	Kabupaten Manggarai	28,4034899	1	0,001901454	6

306	Kabupaten Manggarai Barat	28,3909538	1	0,001032731	4,75
307	Kabupaten Manggarai Timur	28,1752111	1	0,000737395	2,75
308	Kabupaten Ngada	28,1996181	1	0,003627758	1
309	Kabupaten Nagekeo	28,4135166	1	0,012919055	1
310	Kabupaten Rote Ndao	28,2915863	1	(0,000501844)	5,5
311	Kabupaten Sabu Raijua	27,9267607	1	0,000286090	7,25
312	Kabupaten Sikka	28,1161503	1	0,006425026	3
313	Kabupaten Sumba Barat Daya	28,2879992	0	0,003912561	1
314	Kabupaten Sumba Tengah	27,8424675	1	0,000000031	1
315	Kabupaten Sumba Timur	28,4758289	1	(0,000366068)	1
316	Kabupaten Timor Tengah Selatan	28,3548859	1	0,005298420	6,75
317	Kabupaten Timor Tengah Utara	28,2245867	1	0,004698597	0
318	Kota Kupang	25,5425305	1	0,272626138	6,75
319	Provinsi Kalimantan Barat	30,1589150	1	0,014796205	10,5
320	Kabupaten Bengkayang	28,3515415	0	0,009679765	3,5
321	Kabupaten Kapuas Hulu	28,8745389	1	0,002632960	2,5
322	Kabupaten Kayong Utara	28,0798842	0	0,000217626	6,75
323	Kabupaten Ketapang	29,2702228	1	0,021273208	4
324	Kabupaten Kubu Raya	28,3430967	1	0,001433530	10,5
325	Kabupaten Landak	28,7747438	1	0,002853915	10,5
326	Kabupaten Melawi	28,4716173	1	0,002780454	5
327	Kabupaten Mempawah	27,9299385	1	0,001697866	7,75
328	Kabupaten Sambas	28,6196206	1	0,049380049	3,5
329	Kabupaten Sanggau	28,6968055	1	0,006214980	5,75

330	Kabupaten Sekadau	28,3282096	1	0,002902928	6,75
331	Kabupaten Sintang	29,0664091	1	0,007241107	6,5
332	Kota Pontianak	29,7907026	1	0,004694853	2,75
333	Kota Singkawang	28,4019258	1	0,014589578	3,75
334	Provinsi Kalimantan Selatan	30,5480069	1	0,083463642	7,5
335	Kabupaten Banjar	28,9274004	1	0,028275405	5,5
336	Kabupaten Barito Kuala	28,4972273	1	0,024695189	2
337	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	28,8795828	1	0,021325424	1,5
338	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	28,4146243	0	0,024020163	2
339	Kabupaten Hulu Sungai Utara	28,6229944	1	0,013917116	5,75
340	Kabupaten Kotabaru	28,8710301	1	0,072595551	1
341	Kabupaten Tabalong	29,0189938	1	0,034754213	4,75
342	Kabupaten Tanah Bumbu	28,9816301	1	0,018201763	4,5
343	Kabupaten Tanah Laut	29,1204021	1	0,017600932	8,75
344	Kabupaten Tapin	28,5159604	1	0,023015146	7,75
345	Kota Banjarbaru	28,7421637	1	0,051225161	5,75
346	Kota Banjarmasin	28,4102983	1	0,013974574	1
347	Provinsi Kalimantan Tengah	30,0319859	1	0,028811021	9,5
348	Kabupaten Barito Selatan	28,2692909	1	0,035210545	7,75
349	Kabupaten Barito Timur	27,9577244	1	0,006612948	4,5
350	Kabupaten Barito Utara	28,7935954	1	0,005629582	1
351	Kabupaten Gunung Mas	28,3285598	1	0,001600837	4,5
352	Kabupaten Kapuas	28,9449275	1	0,022648213	8,5
353	Kabupaten Katingan	28,7750205	1	0,002966803	6,75

354	Kabupaten Kotawaringin Barat	28,7578846	1	0,047927941	8,5
355	Kabupaten Kotawaringin Timur	28,9106288	1	0,035353886	6,5
356	Kabupaten Lamandau	28,1755000	1	0,004725045	9,25
357	Kabupaten Murung Raya	28,6902997	1	0,009287893	3,5
358	Kabupaten Sukamara	28,3826781	1	0,000758372	2
359	Kabupaten Seruyan	28,8203275	1	0,001378890	1,75
360	Kota Palangka Raya	28,9355555	1	0,004164306	6,5
361	Provinsi Kalimantan Timur	31,1753137	1	0,069982368	8,75
362	Kabupaten Berau	29,8318317	1	0,002009691	1
363	Kabupaten Kutai Barat	29,4551579	1	0,011008234	6
364	Kabupaten Kutai Kartanegara	30,4945181	1	0,036386582	2
365	Kabupaten Kutai Timur	29,9225371	1	0,034808939	5,75
366	Kabupaten Mahakam Ulu	28,4607584	1	0,004276117	1
367	Kabupaten Paser	29,6030508	1	0,004418633	8,75
368	Kabupaten Penajam Paser Utara	29,1237324	1	0,079949729	7,5
369	Kota Balikpapan	30,1241848	1	0,003477568	5,75
370	Kota Bontang	29,4506004	1	0,011966153	4,5
371	Kota Samarinda	30,5956242	1	0,011002804	9,5
372	Provinsi Kalimantan Utara	29,6200883	1	0,058712256	7,25
373	Kabupaten Bulungan	29,3792604	1	0,013328696	1
374	Kabupaten Malinau	29,8924937	1	0,005728380	6,75
375	Kabupaten Nunukan	29,1941321	1	0,037227646	2
376	Kabupaten Tana Tidung	28,7452730	1	0,017313895	6,5
377	Kota Tarakan	29,4328931	1	0,053438205	7,5

378	Provinsi Gorontalo	28,5253084	1	0,032169575	7,5
379	Kabupaten Boalemo	28,0509046	1	0,005988909	8,75
380	Kabupaten Bone Bolango	28,0196178	1	0,018494067	7,75
381	Kabupaten Gorontalo	28,1457260	1	0,027324024	4
382	Kabupaten Gorontalo Utara	27,7407622	1	0,002877523	1
383	Kabupaten Pohuwato	27,9611072	1	0,015399891	2
384	Kota Gorontalo	28,0764707	1	0,059290432	5,75
385	Provinsi Sulawesi Selatan	30,6084236	0	0,098215526	8,5
386	Kabupaten Bantaeng	28,4226459	1	0,030352361	6,75
387	Kabupaten Barru	28,4389621	1	0,022014168	3,75
388	Kabupaten Bone	28,7797765	1	0,005887267	6,75
389	Kabupaten Bulukumba	28,5863467	0	0,014023917	9,75
390	Kabupaten Enrekang	28,3292154	1	0,039548552	6,75
391	Kabupaten Jeneponto	28,4883261	0	0,024916935	2,75
392	Kabupaten Kepulauan Selayar	28,3709236	1	0,005287204	12,25
393	Kabupaten Luwu	28,6234069	1	0,007303699	9,5
394	Kabupaten Luwu Timur	28,8261486	1	0,012966684	4,75
395	Kabupaten Luwu Utara	28,0745137	1	0,035441776	3,5
396	Kabupaten Maros	28,7628925	1	0,012851197	10,5
397	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	28,3579908	1	0,024365160	9,5
398	Kabupaten Pinrang	28,7292369	1	0,006569323	6,75
399	Kabupaten Sidenreng Rappang	28,5903575	1	0,064005714	7,5
400	Kabupaten Sinjai	28,4467173	1	0,069376415	5,25
401	Kabupaten Soppeng	28,4460568	1	0,007621911	5

402	Kabupaten Takalar	28,1086776	0	0,007575101	2
403	Kabupaten Tana Toraja	29,3046141	0	0,017175828	3
404	Kabupaten Wajo	28,8339558	1	0,005517417	7,5
405	Kota Makassar	31,0291289	0	0,004366495	5
406	Kota Palopo	28,4687309	1	0,046337237	10,5
407	Kota Parepare	28,4067289	1	0,018215861	8,5
408	Provinsi Sulawesi Tenggara	30,0750311	1	0,055012689	5,75
409	Kabupaten Bombana	28,2686689	1	0,049123691	2
410	Kabupaten Buton Selatan	27,7668258	1	0,006693151	1
411	Kabupaten Buton Tengah	28,2577902	1	0,000589040	2
412	Kabupaten Buton Utara	27,9626504	1	(0,062921331)	1
413	Kabupaten Kolaka	28,4665631	1	0,009261345	1
414	Kabupaten Kolaka Timur	27,8869861	1	0,001240630	3
415	Kabupaten Kolaka Utara	28,2706721	1	0,035027334	4,5
416	Kabupaten Konawe	28,3840471	1	0,153988013	3
417	Kabupaten Konawe Kepulauan	27,6909491	1	0,009729907	2
418	Kabupaten Konawe Selatan	28,3862884	0	0,063666383	3
419	Kabupaten Konawe Utara	27,9909075	1	0,003055423	1
420	Kabupaten Muna Barat	27,7864919	1	0,003095630	2
421	Kabupaten Wakatobi	28,2206567	1	0,002999046	1
422	Kota Bau-Bau	28,5151429	1	0,005134483	2
423	Kota Kendari	29,3055742	1	0,029949560	5,75
424	Provinsi Sulawesi Tengah	29,5041437	1	0,018132012	8,75
425	Kabupaten Banggai	28,5171581	1	0,020314327	2

426	Kabupaten Banggai Kepulauan	28,8488238	0	0,008626584	2
427	Kabupaten Banggai Laut	27,8653554	1	0,101627969	1
428	Kabupaten Buol	28,3340789	1	0,003781483	3,75
429	Kabupaten Donggala	28,4835071	1	0,007784542	6,5
430	Kabupaten Morowali	28,4940322	1	0,032369718	1
431	Kabupaten Morowali Utara	28,2085383	1	0,021069766	3,75
432	Kabupaten Parigi Moutong	28,5871167	1	0,025631668	1
433	Kabupaten Sigi	28,2349977	1	0,012193052	1
434	Kabupaten Toli-Toli	28,3886687	1	0,001440858	0
435	Kota Palu	28,7781583	1	0,013774683	3
436	Provinsi Sulawesi Utara	29,9271063	1	0,124340453	9,5
437	Kabupaten Bolaang Mongondow	28,1583151	1	0,002279554	6,75
438	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	27,7606201	1	0,003690270	1
439	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	27,6046278	1	0,008339584	1
440	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	27,8470520	1	0,000450970	1
441	Kabupaten Kepulauan Sangihe	28,1533967	1	0,013282461	1
442	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	27,9397967	1	0,002078997	1
443	Kabupaten Kepulauan Talaud	27,8862572	1	0,008975893	1
444	Kabupaten Minahasa	28,3303707	1	0,015047846	2
445	Kabupaten Minahasa Selatan	28,1726448	1	0,009807410	1
446	Kabupaten Minahasa Tenggara	28,0364246	1	0,041906803	0
447	Kabupaten Minahasa Utara	28,1241281	0	0,032329576	1,5



448	Kota Bitung	28,2313120	1	0,017345169	5,5
449	Kota Kotamobagu	27,8237077	1	0,015269469	1
450	Kota Manado	28,9979234	1	0,052315147	2
451	Kota Tomohon	28,1358351	1	0,011562626	2
452	Provinsi Sulawesi Barat	28,7214898	1	0,061294182	6,5
453	Kabupaten Majene	28,0902001	1	0,009879909	1
454	Kabupaten Mamasa	27,9962608	1	0,015226862	5
455	Kabupaten Mamuju	28,4083803	1	0,016215785	0
456	Kabupaten Mamuju Tengah	27,8748801	1	0,039521716	2,75
457	Kabupaten Pasangkayu	28,3605449	1	0,003360558	3,5
458	Kabupaten Polewali Mandar	28,4855114	1	0,017319876	2
459	Provinsi Maluku	29,3888340	1	0,050812351	8,75
460	Kabupaten Buru	28,0234690	1	0,048840971	1
461	Kabupaten Buru Selatan	28,1554204	0	0,006885755	1
462	Kabupaten Maluku Barat Daya	24,6386745	1	0,306974946	1
463	Kabupaten Maluku Tengah	28,5703122	1	0,001205129	2,75
464	Kabupaten Maluku Tenggara	28,0545650	1	0,016463464	2,75
465	Kabupaten Seram Bagian Barat	27,9704514	0	0,027656704	6,75
466	Kabupaten Seram Bagian Timur	28,2553793	0	0,002573388	3
467	Kota Ambon	28,1187166	0	0,096824022	3,5
468	Kota Tual	27,8926271	1	0,009419036	2
469	Provinsi Maluku Utara	29,2931739	1	0,042610650	2
470	Kabupaten Halmahera Barat	28,0068696	1	0,102550387	1
471	Kabupaten Halmahera Tengah	28,5011472	1	0,019218318	2

472	Kabupaten Halmahera Utara	28,2081468	1	0,053969943	3
473	Kabupaten Halmahera Selatan	28,3819636	1	0,076875685	2
474	Kabupaten Halmahera Timur	28,5157607	1	0,029666261	2
475	Kabupaten Kepulauan Sula	27,8497939	1	0,006588707	1
476	Kabupaten Pulau Morotai	28,0174161	1	0,122976177	3,75
477	Kota Ternate	28,5874622	1	0,015811131	9,5
478	Kota Tidore Kepulauan	28,1928795	1	0,002888975	0,75
479	Provinsi Papua	30,6051394	1	0,027611509	5,5
480	Kabupaten Asmat	28,5668218	1	0,014547701	2
481	Kabupaten Biak Numfor	27,9771156	1	0,007214934	4,75
482	Kabupaten Boven Digoel	28,9698735	0	0,000719854	3
483	Kabupaten Deiyai	27,9144208	0	0,038499485	3
484	Kabupaten Dogiyai	28,1790811	0	0,024853381	2,75
485	Kabupaten Intan Jaya	28,6741415	0	0,002920116	1
486	Kabupaten Jayapura	28,5913122	1	0,028327196	2
487	Kabupaten Jayawijaya	28,6934526	1	0,000150223	5,5
488	Kabupaten Keerom	28,4595296	1	0,037580164	0
489	Kabupaten Kepulauan Yapen	28,1808970	1	0,004977324	0
490	Kabupaten Mamberamo Raya	31,2276226	0	0,005005416	0
491	Kabupaten Mamberamo Tengah	28,4441435	0	0,000127818	3
492	Kabupaten Mappi	28,6908652	0	0,022051480	1
493	Kabupaten Merauke	29,2712463	1	0,012832882	1
494	Kabupaten Mimika	29,4588463	1	0,177730464	3
495	Kabupaten Nabire	28,3747644	1	0,063479862	0,75

496	Kabupaten Nduga	28,4764421	0	0,030004851	1
497	Kabupaten Paniai	28,0312066	1	0,006469143	2
498	Kabupaten Pegunungan Bintang	28,7818430	0	0,000226541	0
499	Kabupaten Puncak	28,2755305	1	0,054970888	3
500	Kabupaten Puncak Jaya	28,2978769	1	0,001136230	1
501	Kabupaten Sarmi	28,4060677	0	0,000055261	2
502	Kabupaten Supiori	28,4202124	1	0,006881945	1
503	Kabupaten Tolikara	28,4746453	0	0,017033464	2
504	Kabupaten Yahukimo	28,2376714	1	0,001013243	1
505	Kota Jayapura	28,6534767	1	0,002703169	1
506	Provinsi Papua Barat	30,4212252	1	0,041096865	2
507	Kabupaten Fakfak	28,8043402	1	0,000471072	2
508	Kabupaten Kaimana	28,6289553	1	0,003208820	3
509	Kabupaten Manokwari	28,6017932	1	0,008405716	1,5
510	Kabupaten Manokwari Selatan	27,7516650	1	0,068916154	1,75
511	Kabupaten Raja Ampat	28,6811646	1	0,004211672	2
512	Kabupaten Sorong	29,1566798	1	0,051301745	2
513	Kabupaten Sorong Selatan	28,4898761	1	0,044031808	2
514	Kabupaten Tambrau	28,5497873	1	0,094952803	2
515	Kabupaten Teluk Wondama	28,4004501	1	0,004980144	2
516	Kota Sorong	29,1039874	1	0,075788840	1

## Lampiran 5 : Hasil Output Eviews 10

### Analisis Statistik Deskriptif

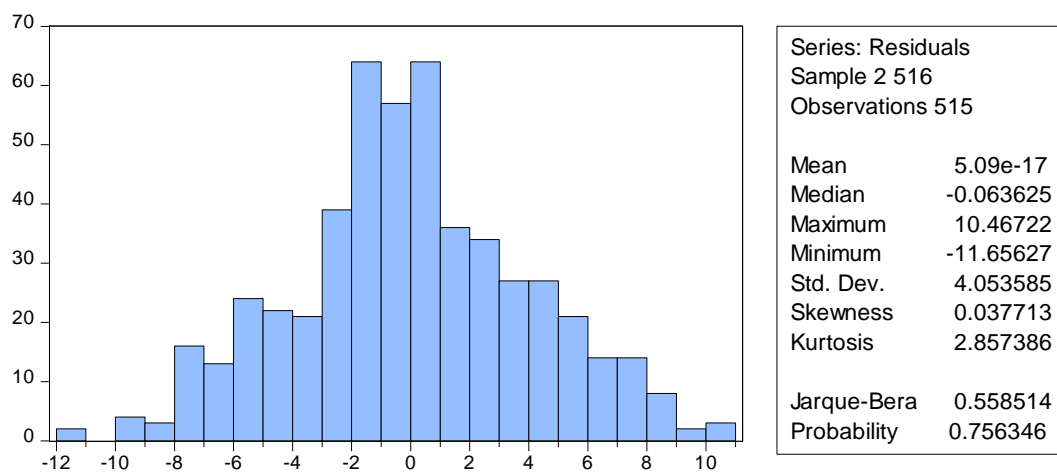
Date: 05/14/23

Time: 06:39

Sample: 1 516

	Y	X1	X2	X3
Mean	5.528585	28.73009	0.906977	0.021846
Median	5.500000	28.57612	1.000000	0.011059
Maximum	13.50000	33.88554	1.000000	0.306975
Minimum	0.000000	24.63867	0.000000	-0.062921
Std. Dev.	3.591763	0.833818	0.290747	0.033698
Skewness	0.177335	0.946931	-2.802243	3.916264
Kurtosis	1.791639	8.279283	8.852564	24.71316
Jarque-Bera	34.09742	676.3371	1411.749	11455.41
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	2852.750	14824.73	468.0000	11.27235
Sum Sq. Dev.	6643.891	358.0551	43.53488	0.584812
Observations	516	516	516	516

### Uji Normalitas



## Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors  
Date: 05/14/23 Time: 06:54  
Sample: 1 516  
Included observations: 515

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.032094	1.000015	NA
D(X1)	0.030355	1.026887	1.026874
D(X2)	0.239068	1.012509	1.012509
D(X3)	15.60224	1.015597	1.015595

## Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.938906	Prob. F(2,509)	0.3935
Obs*R-squared	2.138791	Prob. Chi-Square(2)	0.3477

Test Equation:

Dependent Variable: RESID  
Method: Least Squares  
Date: 05/14/23 Time: 06:55  
Sample: 2 516  
Included observations: 515  
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.002281	0.153417	0.014869	0.9881
D(X1)	-0.006392	0.149267	-0.042822	0.9659
D(X2)	-0.264219	0.419534	-0.629791	0.5291
D(X3)	-1.225413	3.384919	-0.362021	0.7175
RESID(-1)	-0.588981	0.043226	-13.62570	0.0000
RESID(-2)	-0.227391	0.043248	-5.257862	0.0000

R-squared	0.269498	Mean dependent var	5.09E-17
Adjusted R-squared	0.262322	S.D. dependent var	4.053585
S.E. of regression	3.481550	Akaike info criterion	5.344415
Sum squared resid	6169.687	Schwarz criterion	5.393861
Log likelihood	-1370.187	Hannan-Quinn criter.	5.363793
F-statistic	37.55624	Durbin-Watson stat	2.112925
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.199002	Prob. F(3,511)	0.8971
Obs*R-squared	0.600977	Prob. Chi-Square(3)	0.8962
Scaled explained SS	0.638510	Prob. Chi-Square(3)	0.8876

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 05/14/23 Time: 06:55

Sample: 2 516

Included observations: 515

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.165552	0.111682	28.34421	0.0000
D(X1)	0.075770	0.108615	0.697603	0.4857
D(X2)	0.024354	0.304815	0.079897	0.9364
D(X3)	1.022250	2.462455	0.415135	0.6782

R-squared	0.001167	Mean dependent var	3.165219
Adjusted R-squared	-0.004697	S.D. dependent var	2.528528
S.E. of regression	2.534460	Akaike info criterion	4.705575
Sum squared resid	3282.401	Schwarz criterion	4.738539
Log likelihood	-1207.685	Hannan-Quinn criter.	4.718493
F-statistic	0.199002	Durbin-Watson stat	1.536543
Prob(F-statistic)	0.897064		

### Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: D(Y)

Method: Least Squares

Date: 05/14/23 Time: 06:38

Sample (adjusted): 2 516

Included observations: 515 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.018381	0.179147	-0.102605	0.9183
D(X1)	0.478776	0.174227	2.747992	0.0062
D(X2)	0.797057	0.488946	1.630153	0.1037
D(X3)	4.317592	3.949967	1.093070	0.2749
R-squared	0.018973	Mean dependent var	-0.020388	
Adjusted R-squared	0.013214	S.D. dependent var	4.092596	
S.E. of regression	4.065467	Akaike info criterion	5.650671	
Sum squared resid	8445.819	Schwarz criterion	5.683635	
Log likelihood	-1451.048	Hannan-Quinn criter.	5.663590	
F-statistic	3.294234	Durbin-Watson stat	2.957065	
Prob(F-statistic)	0.020364			

## Lampiran 6 : Hasil Uji Plagiasi

Niken S AKS_Muna			
ORIGINALITY REPORT			
<b>22%</b>	<b>23%</b>	<b>11%</b>	<b>14%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
<b>1</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source		<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Gunadarma</b> Student Paper		<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper		<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper		<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>ejournal.almaata.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>lib.ibs.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>



**Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Niken Setyo Ningrum
2. NIM : 195221089
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 31 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kerten, RT.03 RW.08, Laweyan, Surakarta
6. Nama Ayah : Setyo Mulyono
7. Nama Ibu : Supatmi
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri Sumber 6 Surakarta Masuk Tahun 2007
  - b. SMP Negeri 12 Surakarta Masuk Tahun 2013
  - c. SMK Negeri 6 Surakarta Masuk Tahun 2016
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Mei 2023

Penulis